



LAPORAN KINERJA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

TAHUN 2022

OT.04/LPP-93/PW22/6/2023
9 JANUARI 2023



Jalan Kapten Tantular
Renon-Denpasar

www.bpkp.go.id/bali

@bpkpbali

Hadir Bermanfaat

KATA PENGANTAR



Perwakilan BPKP Provinsi Bali menyusun laporan kinerja tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan keuangan negara /daerah dan pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pertanggungjawaban kinerja untuk menggambarkan prioritas dan capaian-capaian sasaran kinerja perwakilan sepanjang Tahun 2022. Segenap gagasan dan upaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan hasil akhir kinerja yang tertuang dalam laporan ini. Tahun 2022

merupakan periode ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Bali periode 2020 – 2024. Sejalan dengan fokus pemerintah, pada tahun 2022 BPKP memprioritaskan pengawasannya untuk mengawal percepatan pemulihan ekonomi nasional dan memastikan efektivitas perlindungan kesehatan dan sosial terhadap pandemi Covid-19. Untuk mendukung pencapaian kinerja Renstra BPKP dan mengawal percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan 420 program kerja pengawasan.

Sebagai hasilnya, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah berkontribusi positif bagi keuangan negara senilai 448,25 milyar rupiah. Program pembangunan prioritas nasional dan daerah juga dikawal akuntabilitasnya, antara lain pembangunan infrastruktur strategis, penyaluran berbagai bantuan sosial, dukungan bagi korporasi dan pelaku usaha, bantuan pendidikan, serta pemulihan ekonomi dampak dari Covid-19. Kinerja perwakilan juga diarahkan untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada 10 pemda, penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), peningkatan tata kelola desa dan penguatan efektivitas pengendalian korupsi pada Pemerintah Daerah. Pada area kekayaan negara yang dipisahkan, perwakilan juga memastikan akuntabilitas penyelenggaraan korporasi negara dan mengawal berbagai aksi strategis Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D). Garis besar capaian hasil pengawasan tersebut kami sajikan dalam infografis ringkasan eksekutif.

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali secara umum telah mencapai target untuk 31 IKK dari 33 IKK. Capaian yang belum memenuhi target pada dua IKK karena peta risiko korupsi dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang disusun belum diterapkan pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan keselarasan perencanaan serta pemenuhan kriteria SMART pada indikator dan target kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah perlu ditingkatkan. Untuk itu, peningkatan kinerja dan kualitas hasil pengawasan senantiasa diupayakan melalui penguatan SDM, ketaatan terhadap standar pengawasan, serta pemanfaatan sarana prasarana secara optimal.

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali merupakan bagian dari kinerja BPKP sehingga diharapkan dengan tercapainya target-target kinerja akan mendukung tercapainya visi BPKP bagi Pemerintah yakni "Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Bali sehingga dapat menjalankan pengawasan dengan sebaik-baiknya. Kami berharap laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang berkepentingan, maupun masyarakat pada umumnya.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Muhammad Masykur
NIP 19640227 198402 1 001



· UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
· Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



RINGKASAN EKSEKUTIF

AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

Target (Juta Rupiah) **3.474**

Realisasi (Juta Rupiah) **4.264**

Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

Target (Juta Rupiah) **435.688**

Realisasi (Juta Rupiah) **438.685**

Penyelamatan Keuangan Negara

Target (Juta Rupiah) **770**

Realisasi (Juta Rupiah) **5.307**

AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

PSN

2 PSN

4 PSN

Target

Realisasi

APPD

2 APPD

2 APPD

Hasil Pengawasan

Target **80%**
Tertindaklanjuti

Realisasi **81.25%**
Tertindaklanjuti

AKUNTABILITAS BADAN USAHA

BUMD&BLUD SEHAT

10

Target

11

Realisasi

BUMDES Mampu Menyusun Laporan Keuangan

27

Target

59

Realisasi

BUMDES Berkontribusi ke Desa

8

Target

10

Realisasi

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI

Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan

Target 100%
Realisasi 100%

Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan

Target 80%
Realisasi 100%

Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Target 3 PEMDA
Realisasi 1 PEMDA

Pemda Menindaklanjuti Area of Improvement

Target 1 PEMDA
Realisasi 3 PEMDA

KUALITAS PENGENDALIAN INTERN

Kapabilitas APIP & SPI Level 3

Target 8 PEMDA
1 BLUD
Realisasi 8 PEMDA
1 BLUD

SPIP Level 3

Target 10 PEMDA
Realisasi 10 PEMDA

Akuntabilitas Keuangan, dan Kinerja

Target 4 PEMDA
20 DESA
Realisasi 3 PEMDA
636 DESA

MRI Level 3

Target 4 PEMDA
1 BUMD
3 BLUD
Realisasi 4 PEMDA
1 BUMD
3 BLUD

Pengelolaan Aset Memadai

Target 20 DESA
Realisasi 30 DESA

TATA KELOLA UNIT PERWAKILAN

ZI

Target skor 75
Realisasi skor 84

IKPA

Target skor 95
Realisasi skor 97.57

SAKIP

Target skor 82
Realisasi skor 88

KEPUASAN LAYANAN

Target skor 75
Realisasi skor 90

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN SPIP

Target 70%
Realisasi 87.42%

PENGELOLAAN BMN

Target skor 80
Realisasi skor 95

PENYELESAIAN RTP (MRI)

Target 100%
Realisasi 100%

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Grafik	vii
Pendahuluan	1
Perencanaan Kinerja	8
Akuntabilitas Kinerja	19
Kerangka Pengukuran Kinerja	21
Capaian Kinerja Tahun 2021	21
1. Ringkasan Kinerja	21
2. Evaluasi Kinerja	24
Sasaran Kegiatan 1	24
Sasaran Kegiatan 2	30
Sasaran Kegiatan 3	36
Sasaran Kegiatan 4	41
Sasaran Kegiatan 5	48
Sasaran Kegiatan 6	62
Analisis Efisiensi	70
Kinerja Lainnya	71
Akuntabilitas Keuangan	72
Penutup	74
Kilas Peristiwa	77
Lampiran	80

DAFTAR TABEL

2.1	Indikator dan Target Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2020-2024	10
2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
3.1	Ringkasan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2022	22
3.2	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional Tahun 2022	24
3.3	Ringkasan Nilai Potensi Penerimaan Daerah yang Terealisasi Tahun 2022	25
3.4	Ringkasan Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah Tahun 2022	27
3.5	Ringkasan Nilai Penyelamatan Keuangan Negara Tahun 2022	28
3.6	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional Tahun 2022	30
3.7	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha Tahun 2022	37
3.8	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2022	42
3.9	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU Tahun 2022	49
3.10	Level Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota	51
3.11	Opini LKPD dan Hasil Evaluasi SAKIP Pemda	56
3.12	Capaian Kinerja sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan Tahun 2022	63
3.13	Hasil Perhitungan Efisiensi per Sasaran Kegiatan Tahun 2022	70
3.14	Anggaran dan Realisasi Keuangan per Jenis Belanja	72
3.15	Anggaran dan Realisasi Keuangan per Kegiatan	72
3.16	Penggunaan Dana Pihak Ketiga	73

DAFTAR GRAFIK

3.1	Perbandingan target dan realisasi IKK "Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi" tahun 2020 s.d. 2024	25
3.2	Perbandingan target dan realisasi IKK "Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah" tahun 2020 s.d. 2024	28
3.3	Perbandingan target dan realisasi IKK "Nilai Penyelamatan Keuangan Negara" tahun 2020 s.d. 2024	29
3.4	Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Proyek Strateis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target" tahun 2020 s.d. 2024	32
3.5	Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi" tahun 2020 s.d. 2024	35
3.6	Perbandingan target dan realisasi IKK "Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti" tahun 2020 s.d. 2024	36
3.7	Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat" tahun 2020 s.d. 2024	38
3.8	Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat" tahun 2020 s.d. 2024	39
3.9	Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BUMDES yang Mampu Menyusun Laporan" tahun 2020 s.d. 2024	40
3.10	Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BUMDES yang Mampu Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa" tahun 2020 s.d. 2024	41
3.11	Perbandingan target dan realisasi IKK "Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" tahun 2020 s.d. 2024	43
3.12	Perbandingan target dan realisasi IKK "Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" tahun 2020 s.d. 2024	45
3.13	Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik" tahun 2020 s.d. 2024	46
3.14	Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Pemda Menindaklanjuti Area Of Improvement dari Hasil	48

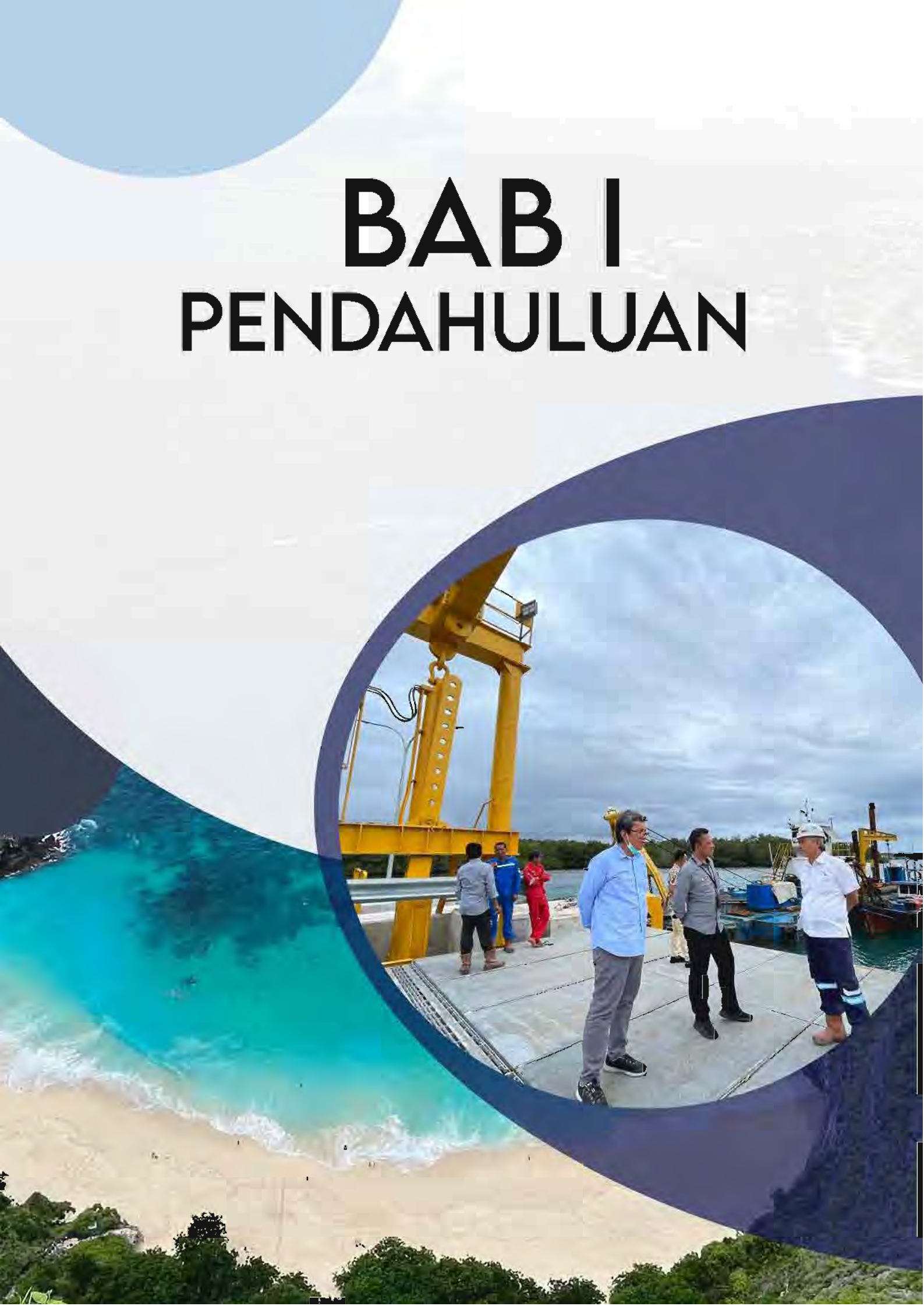
DAFTAR GRAFIK

Pengukuran EPK" tahun 2020 s.d. 2024	
3.15 Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024	50
3.16 Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024	52
3.17 Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024	53
3.18 Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024	54
3.19 Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024	54
3.20 Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024	55
3.21 Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah" tahun 2020 s.d. 2024	57
3.22 Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel" tahun 2020 s.d. 2024	58
3.23 Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BUMDES yang Mampu Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa" tahun 2020 s.d. 2024	59
3.24 Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024	60
3.25 Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024	61
3.26 Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024	62
3.27 Perbandingan target dan realisasi IKK "Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja" tahun 2020 s.d. 2024	64

DAFTAR GRAFIK

3.28 Perbandingan target dan realisasi IKK "Nilai SAKIP Unit Kerja" tahun 2020 s.d. 2024	65
3.29 Perbandingan target dan realisasi IKK "Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)" tahun 2020 s.d. 2024	66
3.30 Perbandingan target dan realisasi IKK "Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)" tahun 2020 s.d. 2024	67
3.31 Perbandingan target dan realisasi IKK "Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja" tahun 2020 s.d. 2024	68
3.32 Perbandingan target dan realisasi IKK "Skor IKPA Unit Kerja" tahun 2020 s.d. 2024	69
3.33 Perbandingan target dan realisasi IKK "Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja" tahun 2020 s.d. 2024	70

BAB I PENDAHULUAN





A. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi BPKP diatur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan Negara/daerah, dan pembangunan nasional.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi:

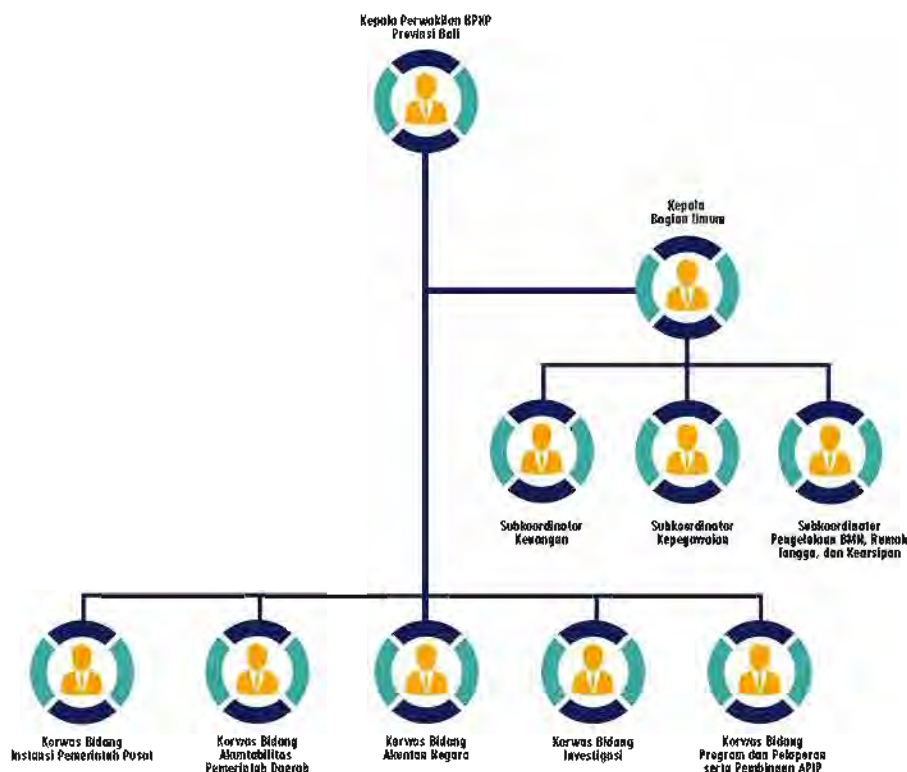
1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
4. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya;
7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Pusat;
8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;



9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP;
14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014 tanggal 19 September 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi. Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah unit organisasi perwakilan BPKP tipe B untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di wilayah Provinsi Bali dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP.



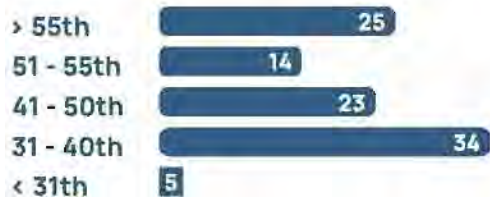
Pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Bali didukung oleh SDM yang handal.

Posisi Pegawai
per 31 Desember 2022 berjumlah

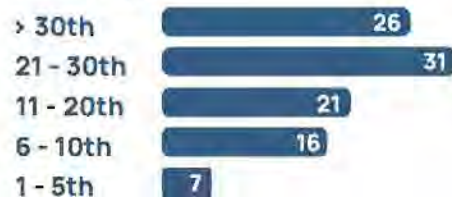
101 orang

Komposisi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Bali per 31 Desember 2022

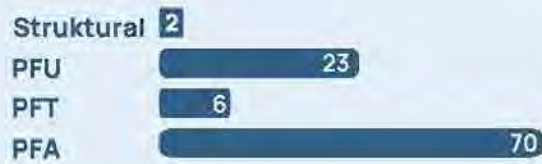
Usia



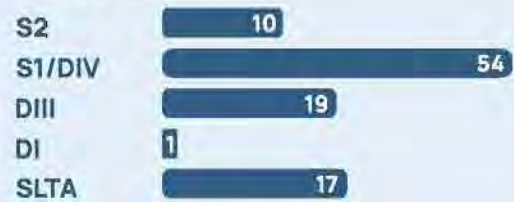
Masa Kerja



Jabatan



Pendidikan



Laki - Laki
49



Perempuan
52



C. ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI



Pada tahun 2020, Kepala BPKP telah menetapkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut, dinyatakan bahwa BPKP berperan memastikan ketercapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden periode 2020-2024, melalui pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas

Untuk menjalankan peran tersebut, dalam periode 2020-2024, BPKP melaksanakan pengawasan intern dan membangun tata kelola pengawasan intern dengan menitikberatkan pada beberapa isu strategis sebagai

1. Pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan daerah;
2. Pengawasan intern atas akuntabilitas pembangunan nasional;
3. Pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan badan usaha;
4. Pengawasan intern dalam rangka pemberantasan korupsi;
5. Pengawasan intern dalam rangka meningkatkan kualitas pengendalian intern instansi pemerintah dan badan usaha;
6. Meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan intern BPKP.

6 ISU STRATEGIS PENGAWASAN BPKP

Akuntabilitas Keuangan Negara

Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Akuntabilitas Badan Usaha

Pengendalian Korupsi

Pengendalian

Tata Kelola Intern BPKP

Isu-isu strategis tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

- 1. Pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan daerah**

Pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah dan tertuang dalam rencana kerja pemerintah (RKP) membutuhkan pendanaan yang sangat besar. BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan untuk meningkatkan ruang fiskal guna mendanai pembangunan nasional tersebut melalui pengawasan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara/daerah, dan memastikan bahwa belanja pemerintah dalam rangka pembangunan nasional telah efisien, efektif, dan ekonomis serta mampu menyelamatkan keuangan negara dari segala kerugian akibat pengelolaan keuangan yang tidak
- 2. Pengawasan intern atas akuntabilitas pembangunan nasional**

Pencapaian target pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP harus terus dimonitor untuk memastikan agar kemajuannya sesuai dengan rencana dan pencapaiannya sesuai dengan target. BPKP mengemban amanat tersebut dan berperan dalam mengawal kemajuan pencapaian target, serta turut berperan menyampaikan saran strategis kepada Presiden dan penanggung jawab pembangunan nasional untuk mengatasi hambatan dalam
- 3. Pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan badan usaha**

Badan usaha, yang terdiri dari badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum (BLU), dan badan usaha milik desa (BUMDes) berperan penting dalam menggerakkan perekonomian di tingkat nasional, daerah, dan desa. Di samping itu, badan usaha berkontribusi dalam mendanai pembangunan nasional, daerah, dan desa melalui pembagian keuntungan yang diperoleh kepada negara, daerah, dan desa. Untuk memastikan agar badan usaha dikelola secara baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, BPKP berperan dalam membantu badan usaha untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitasnya, sehingga badan usaha dapat dikelola dengan akuntabel; mampu menggerakkan perekonomian nasional, daerah, dan desa sesuai dengan maksud pendiriannya; serta memberikan
- 4. Pengawasan intern dalam rangka pemberantasan korupsi**

Korupsi masih menjadi masalah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2021, skor indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 38 (urutan 96 dari 180 negara) berdasarkan indikator nol (0 - sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Dalam periode 2020-2024, BPKP berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi, melalui upaya represif (penegakan hukum), preventif, dan edukatif. Upaya preventif dijalankan melalui sosialisasi dan *evaluasi fraud risk assessment* (FRA) dan *fraud control plan* (FCP). Upaya edukasi anti korupsi dijalankan melalui sosialisasi program anti korupsi di lingkungan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat umum. Masyarakat umum menjadi sasaran sosialisasi program anti korupsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan deteksi dini

5. Pengawasan intern dalam rangka meningkatkan kualitas pengendalian intern instansi pemerintah dan badan usaha
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menerapkan sistem pengendalian intern. Penerapan sistem pengendalian intern dimaksudkan agar instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan efektif, efisien dan ekonomis, dengan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menjaga keamanan aset yang dimiliki. BPKP menjadi pembina penyelenggaraan SPIP mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan penerapan SPIP yang memadai di lingkungan instansi pemerintah. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, BPKP perlu meningkatkan kapabilitas APIP instansi pemerintah sehingga dapat

6. Meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan intern BPKP
Untuk dapat menjalankan pengawasan secara profesional, kualitas tata kelola organisasi BPKP perlu terus menerus ditingkatkan. Pada periode 2020-2024, BPKP berkomitmen berperan aktif sebagai pemberi saran yang terpercaya bagi seluruh *stakeholder* BPKP (*Trusted Advisor*).



D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja ini melaporkan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2022, yang diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, dan berbagai kendala dalam pencapaian kinerja. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan dalam perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali terdiri atas empat bab.

PENDAHULUAN

Memuat uraian tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPKP serta isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi

1

PERENCANAAN

Memuat rencana dan target kinerja guna menyelesaikan isu-isu terkait dengan tugas dan fungsi BPKP

2

3

AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat pencapaian target dalam menyelesaikan isu-isu strategis, beserta analisis mengenai kendala dan strategi peningkatan kinerja tahun berikutnya

4

PENUTUP

Memuat kesimpulan kinerja BPKP dalam menyelesaikan isu-isu strategis, dan strategi peningkatan kinerja tahun berikutnya



BAB II

PERENCANAAN KINERJA





SPAN BURAH
IP4 717A6



A. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2020 - 2024

Dalam Renstra BPKP tahun 2020-2024, telah ditetapkan indikator-indikator dan target-target kinerja BPKP kurun waktu tahun 2020-2024 pada tingkat organisasi BPKP, tingkat unit kerja eselon I, dan tingkat unit kerja eselon II. Indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra tersebut, seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) pada tingkatannya masing-masing. Program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPKP, berupa program pengawasan pembangunan yang merupakan program untuk menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) dan program dukungan manajemen yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan. Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dengan sasaran dan indikator kegiatan per tahun sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator dan Target Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis (BPKP)	Sasaran Kegiatan (Eselon II)	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
Program 06 : Program Pengawasan Pembangunan									
SSI	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1. Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	IKK1: Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rupiah (Dalam juta)	136	407	610	813	1.016
			IKK2: Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rupiah (Dalam juta)	271	678	1.016	1.355	1.694
			IKK3: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Dalam juta)	1.123	186.779	154.487	136.270	112.930
			IKK4: Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rupiah (Dalam juta)	27.124	40.679	49.715	56.500	51.982
			IKK5: Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rupiah (Dalam juta)	-	118	120	122	125
			IKK6: Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rupiah (Dalam juta)	-	59	60	61	62

No	Sasaran Strategis (BPKP)	Sasaran Kegiatan (Eselon II)	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
SS2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	IKK7: Jumlah Program Prioritas (PP) yang tercapai sesuai target	Jumlah PP	0	2	0	0	0
			IKK8: Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang diawasi	Jumlah KP	9	9	9	9	9
			IKK9: Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang tercapai sesuai target	Jumlah KP	9	9	9	9	9
			IKK10: Jumlah Program Strategis Nasional (PSN) yang tercapai sesuai target	Jumlah PSN	0	0	0	0	0
			IKK11: Jumlah Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	Jumlah Program Linsek	0	1	1	1	1
			IKK12: Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	Persentase	0,00%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%
			IKK13: Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persentase	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%	85,00%
SS3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	IKK14: Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	0	0	0	0	0
			IKK15: Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	Jumlah BUMD	0	0	0	1	3
			IKK16: Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	9	9	9	9
			IKK17: Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	1	1	1	1
			IKK18: Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	18	23	27	34	38
			IKK19: Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persentase	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SS4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	IKK20: Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persentase	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%
			IKK21: Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	0	0	2	3	4





No	Sasaran Strategis (BPKP)	Sasaran Kegiatan (Eselon II)	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
			IKK22: Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Badan Usaha	0	0	0	1	2
SS5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	5. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	IKK23: Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	APIP	7	8	9	9	10
			IKK24: Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	K/L/Pe mda	10	10	10	10	10
			IKK25: Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Pemda	0	0	1	1	1
			IKK26: Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $>$ Level 3	Pemda	1	2	3	4	5
			IKK27: Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen tase	0,55%	1,48%	1,66%	1,85%	1,85%
			IKK28: Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rekom endasi	1	1	1	1	1
			IKK29: Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen tase	44,97%	50,00%	55,03%	60,06%	64,94%
			IKK30: Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	0	20	61	94	176
			IKK31: Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1	2	3	5	5
			IKK32: Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	0	0	0	0	0
			IKK33: Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	0	0	1	2	4
			IKK34: Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	0	1	3	4	5
			IKK35: Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	BUMD	0	0	0	1	3
IKK36: Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	BLUD	0	0	1	1	1			

No	Sasaran Strategis (BPKP)	Sasaran Kegiatan (Eselon II)	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
Program D1 - Program Dukungan Manajemen Internal									
SS6	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	IKK 1: Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai	75	76	77	78	79
		Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Indeks Merit)	IKK 2: Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100	100	100	100	100
			IKK 3: Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100
			IKK 4: Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Unit Perwakilan	IKK 5: Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai (1-100)	86	87	88	89	90
			IKK 6: Persentase SPM yang terbit tepat waktu	%	90	91	92	93	95
			IKK 7: Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	%	100	100	100	100	100
			IKK 8: Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			IKK 9: Nilai SAKIP Unit Kerja	Nilai (1-100)	80	81	82	83	84
		Meningkatnya Pengendalian Intern Unit Perwakilan	IKK 10: Maturitas SPIP Unit Kerja	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
			IKK 11: Indeks MR Unit Kerja	Level	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
		Meningkatnya Kepuasan Layanan Perwakilan	IKK 12: Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Nilai Indeks (skala 1-100)	70	76	80	81	82
			IKK 13: Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Nilai Indeks (skala 1-100)	70	73	76	80	81



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka penguatan pencapaian sasaran strategis telah disusun perjanjian kinerja yang berisikan mandat dari Kepala BPKP kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2021 telah menetapkan sasaran kinerja dengan indikator kinerja kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Dalam juta)	3.474
		1.2 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Dalam juta)	435.688
		1.3 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Dalam juta)	770
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	2
		2.2 Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Topik APPD	2
		2.3 Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3.1 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9
		3.2 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1
		3.3 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	27
		3.4 Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	8
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100
		4.2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80
		4.3 Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3
		4.4 Jumlah Pemda menindaklanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1
		5.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	7
		5.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1
		5.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	9
		5.5 Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Prov	1
		5.6 Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	3
		5.7 Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	4
		5.8 Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20
		5.9 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	20
		5.10 Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	1
		5.11 Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3	BLU/D	3
		5.12 Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLU/D	1

No.	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75
		6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82
		6.3	Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	Persen	70
		6.4	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)	Persen	100
		6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75
		6.6	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95
		6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	80

Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2022 tersebut di atas didukung oleh dana DIPA BPKP sebesar Rp24.908.362.000,00.

Sesuai tema rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, rencana kinerja BPKP tahun 2022 diarahkan pada pengawasan atas pencapaian target RKP tahun 2022, yaitu mengawal percepatan pemulihan ekonomi nasional. BPKP melakukan pengawasan terhadap rencana kerja pemerintah dan menuangkan dalam Kebijakan pengawasan berupa Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) BPKP

APP dan APPD BPKP Tahun 2022 merupakan terobosan baru BPKP agar pengawasan terkoordinasi dan terarah dalam rangka mengawal percepatan pemulihan ekonomi nasional. APP tersebut terbagi dalam 7 sektor, 29 tema dan 99 topik pengawasan. Rincian APP BPKP Tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Sektor/Tema	Topik
A	Reformasi Pembangunan SDM	
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional b. Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan c. Bantuan Operasional Sekolah d. Program Indonesia Pintar e. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan Covid-19 Vaksinasi b. Penanganan Covid-19 Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan c. Penanganan Covid-19 Pembayaran Klaim Rumah Sakit d. Penanganan Covid-19 Pengadaan Barang dan Jasa (alat testing/tracing, almatkes, obat dan faskes) e. Penanganan Covid-19, Perubahan Perilaku, Komukasi Publik dan Satu Data BLC f. <i>Stunting</i> g. Jaminan Kesehatan Nasional h. Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Primer i. Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Rujukan j. Reformasi Sistem Kesehatan-Kemandirian Industri Farmasi dan Almatkes k. Reformasi Sistem Kesehatan-Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan

No.	Sektor/Tema	Topik
3.	Perlindungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya) b. Pengembangan Skema Perlinsos Adaptif c. Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja) d. Implementasi Bansos APBD e. Implementasi Bansos APBDesa
B Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas		
1.	Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun b. Infrastruktur SPAM c. Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)
2.	Penguatan Infrastruktur untuk Energi dan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur Jaringan Gas b. Infrastruktur Jaringan Irigasi c. Infrastruktur Jaringan Listrik
3.	Penguatan Infrastruktur untuk Produktivitas, Konektivitas dan Mobilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Jalan b. Pembangunan Jembatan c. Pembangunan Jalan Tol d. Pembangunan Jalur Kereta Api (termasuk kereta cepat Jkt - Bdg) e. Pembangunan Bandara f. Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan
4.	Pemerataan Infrastruktur Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan BTS b. Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet
5.	Optimalisasi Pemanfaatan KPB	
C Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah		
1.	Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran K/L b. Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa K/L c. Penguatan Kualitas Belanja Pemerintah Pusat (Fokus pada Perlindungan Sosial) d. Tata Kelola Pendapatan Negara
2.	Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah b. Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah c. Optimalisasi PAD d. patan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah) e. Penguatan Kualitas Pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Papua dan Papua Barat) f. Pemanfaatan APBD untuk PC PEN (termasuk TKDD)
3.	Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa b. Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa c. Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa
4.	Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan	<ul style="list-style-type: none"> a. BUMN b. BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BPD) c. BLU/BLUD (Fokus pada BLU/BLUD Kesehatan dan BLU/BLUD Pendidikan)

No.	Sektor/Tema	Topik
D Pemulihan Ekonomi		
1.	Stimulus dan Dukungan untuk Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro b. Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan subsidi bunga/subsidi margin KUR baik reguler maupun tambahan) c. Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (Non KUR dan subsidi bunga/margin)
2.	Stimulus dan Dukungan terhadap Korporasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penempatan Dana b. Penjaminan c. Penyertaan Modal Negara pada BUMN
3.	Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Stimulus dan Insentif Perpajakan b. Kemudahan Perizinan (OSS)
4.	Perbaikan Neraca Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Ekspor b. P3DN (fokus pada industri Kesehatan, Industri Energi, Industri Jasa Konstruksi dan 10 K/L dengan anggaran terbesar)
5.	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan DPSP b. Bantuan Stimulus kepada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Masa Pandemi Covid-19
6.	Pembangunan Energi Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Transformasi Energi Baru Terbarukan b. Subsidi Listrik, BBM, dan Gas
E Ketahanan Pangan		
1.	Peningkatan Produksi Bahan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tata Kelola Subsidi Pupuk b. Tata Kelola Program Benih Unggul c. Tata Kelola Program Bibit Temak
2.	Peningkatan Dukungan Peralatan Produksi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dukungan Peralatan Produksi Pertanian b. Dukungan Peralatan Produksi Perikanan
3.	Peningkatan Infrastruktur Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Food estate b. Lumbung Perikanan Nasional
4.	Tata kelola Cadangan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah b. Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
F Pengentasan Kemiskinan Ekstrem		
1.	Kebijakan Penurunan Kemiskinan Ekstrem	<ul style="list-style-type: none"> a. PILAR I -Komitmen Pemerintah b. PILAR II-Konvergensi Program, Anggaran dan Sasaran c. PILAR III -Pemantauan dan Evaluasi
2.	Penurunan Beban Pengeluaran	<ul style="list-style-type: none"> a. PKH b. Kartu Sembako c. Kartu Indonesia Sehat d. Kartu Indonesia Pintar e. Subsidi Listrik, BBM, dan Gas f. PBI-Jamsos Ketenagakerjaan g. Bantuan Subsidi Upah
3.	Peningkatan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Akses Permodalan b. Peningkatan Aset Produktif c. Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha d. Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan e. Optimalisasi Program Padat Karya f. Pengembangan Potensi Desa
4.	Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat	

No.	Sektor/Tema	Topik
G Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih		
1.	Penguatan Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> a. Reformasi Birokrasi b. SPIP c. Kapabilitas APiP
2.	Pengendalian Kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan Kecurangan b. Deteksi Kecurangan c. Respons Kecurangan

Sedangkan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) di Provinsi Bali antara lain:



Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung



Pengawasan Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Data kinerja yang dikumpulkan berupa target dan realisasi kinerja beserta uraian rinci kinerja, target, dan realisasi keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber daya manusia, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2022. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memperoleh data kinerja yang akurat dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi realisasi kinerja dari pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam tahun 2022, untuk selanjutnya dilakukan perbandingan realisasi tersebut dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah rumus *maximize*, sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2022 ini merupakan akuntabilitas kinerja tahun ketiga dari Renstra BPKP tahun 2020-2024 yang terdiri dari enam sasaran kegiatan atas dua program. Pada tahun 2022, sebanyak enam Sasaran Kegiatan telah ditetapkan, yang keberhasilannya dinilai dengan 33 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Ringkasan Kinerja

Secara umum, rerata capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2022 adalah 201,62%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas enam Sasaran Kegiatan dengan 33 IKK yang ditargetkan pada tahun 2022, seluruhnya mencapai rerata kinerja di atas 100%. Capaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp24.303.726.075,00 atau 97,57% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp24.908.362.000,00 dan penggunaan SDM sebanyak 29.138 OH atau 107,56% dari rencana 27.089 OH. Uraian rerata capaian kinerja masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah sebesar 304,24%. Keberhasilan pencapaian didukung dengan komitmen pemda untuk menindaklanjuti hasil evaluasi OPAD dan pemantauan monitoring tindak lanjut OPAD yang dilakukan secara berkala oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

- 2) Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional sebesar 133,85%. Keberhasilan pencapaian didukung dengan komitmen mitra kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan.
- 3) Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 3 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha sebesar 160,88%. Keberhasilan pencapaian didukung komitmen badan usaha dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, serta kerja sama yang baik dengan badan usaha yang dibina.
- 4) Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi sebesar 139,58%. Keberhasilan pencapaian didukung dengan melakukan 14 penugasan pengawasan bersifat edukasi dan pencegahan korupsi, dan 38 penugasan pengawasan respons atas kecurangan/korupsi telah melampaui dari target. Semua hasil pengawasan telah dimanfaatkan/ditindaklanjuti oleh *stakeholders*.
- 5) Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU sebesar 358,75%. Keberhasilan pencapaian didukung Perwakilan BPKP yang proaktif dalam mendorong pemda/badan usaha untuk menerapkan SPIP/MR/Kapabilitas APIP/akuntabilitas keuangan melalui pendampingan dan Komitmen dari Pemda/badan usaha untuk menerapkan SPIP/MR/Kapabilitas APIP.
- 6) Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan sebesar 112,43%. Keberhasilan pencapaian didukung dengan sinergi dan koordinasi yang baik antar bidang.

Keenam sasaran kegiatan di atas diukur dengan 33 IKK. Berdasarkan hasil pengukuran 33 IKK, 31 IKK telah mencapai kinerja di atas 100% sedangkan dua IKK yang lain masih berada di bawah 100%. Dua IKK yang belum mencapai target disebabkan peta risiko korupsi dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang disusun belum diterapkan pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan keselarasan perencanaan serta pemenuhan kriteria SMART pada indikator dan target kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah perlu ditingkatkan. Rincian capaian masing-masing sasaran strategis dan IKK disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Ringkasan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah					
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (juta)	3.474	4.264,46	122,75	■
1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (juta)	435.688	438.685,45	100,69	■
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (juta)	770,00	5.307,47	689,28	■

No.	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional					
2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	2	4	200	■
2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Topik APPD	2	2	100	■
2.3	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80	81,25	101,56	■
III	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha					
3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	8UMD	9	9	100,00	■
3.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	2	200,00	■
3.3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	27	59	218,52	■
3.4	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	8	10	125,00	■
IV	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi					
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,0	■
4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	80	100	125,0	■
4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3	1	33,33	■
4.4	Jumlah Pemda menindaklanjuti <i>Area Of Improvement</i> dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1	3	300,0	■
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU					
5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1	1	100,00	■
5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	7	7	100,00	■
5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1	1	100,00	■
5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	9	9	100,00	■
5.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Prov	1	1	100,00	■
5.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	3	3	100,00	■
5.7	Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Pemda	4	3	75,00	■
5.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20	636	3.180,00	■
5.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	20	30	150,00	■
5.10	Jumlah BUMD dengan MRI $>$ Level 3	BUMD	1	1	100,00	■
5.11	Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3	BLUD	3	3	100,00	■
5.12	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLU/D	1	1	100,00	■
VI	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan					
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	84,44	112,59	■

No.	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	88,45	107,87	■
6.3	Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	Persen	70	87,42	124,88	■
6.4	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)	Persen	100	100	100,00	■
6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	90,1	120,13	■
6.6	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95	97,57	102,71	■
6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	80	95,06	118,83	■

Keterangan :

■ Tercapai/melampaui target

■ Belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibanding tahun lalu

■ Belum mencapai target

2) Evaluasi Kinerja

Sasaran Kinerja 1

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Pencapaian sasaran kegiatan "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah" diindikasikan dalam capaian tiga IKK, yaitu:

1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi
2. Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah
3. Nilai penyelamatan keuangan Negara

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah					
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (juta)	3.474	4.264,46	122,75	■
1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (juta)	435.688	438.685,45	100,69	■
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (juta)	770,00	5.307,47	689,28	■
Total/Rerata Capaian			439.932,00	448.257,38	304,24	

Tabel 3.2. di atas menunjukkan bahwa hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2022 telah berkontribusi pada peningkatan ruang fiskal sebesar Rp448.257.379.670,26. Dengan demikian sasaran kegiatan "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah" memiliki capaian kinerja yang tinggi yaitu sebesar 304,24% dari target tahun 2022 sebesar Rp 439.932.000.000,00.

Tingginya capaian kinerja karena adanya efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah dan komitmen *auditee* dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPKP. Uraian selengkapnya atas kinerja empat IKK sasaran kegiatan 1 sebagai berikut:

2.1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi

IKK "Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi" menggambarkan sejauh mana nilai realisasi penerimaan negara/daerah yang dapat dioptimalisasi melalui kegiatan pengawasan BPKP.

Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi diukur dari jumlah kurang bayar atas penerimaan negara/daerah yang sudah disetor/ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk PNBP berdasarkan bukti setor
- b. Untuk Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan
- c. Untuk PAD berdasarkan Surat Ketetapan

Pada tahun 2022, nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi sebesar Rp4.264.459.608,00 atau tercapai 124,51% dari target sebesar Rp3.474.000.000,00. Nilai tersebut merupakan hasil optimalisasi pengawasan OPAD pada Pemerintah Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Ringkasan Nilai Potensi Penerimaan Daerah yang Terealisasi Tahun 2022

No.	Jenis Penerimaan	Nilai SKPDKB (Rp)
1	Pajak Hotel	3.142.791.112,00
2	Pajak Restoran	1.118.945.996,00
3	Pajak Air Tanah	2.722.500,00
Total		4.264.459.608,00

Selain itu, perwakilan juga melaksanakan evaluasi dan asistensi potensi optimalisasi pendapatan asli daerah dengan nilai potensi optimalisasi PAD sebesar Rp6.629.622.896,14 pada Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan. Realisasi "Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi" mengalami penurunan sebesar Rp2.336.744.819,66 atau 35,40% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp6.601.204.427,66. Realisasi tahun 2022 telah melampaui target akhir Renstra sebesar Rp2.710.000.000,00.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.1.



Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

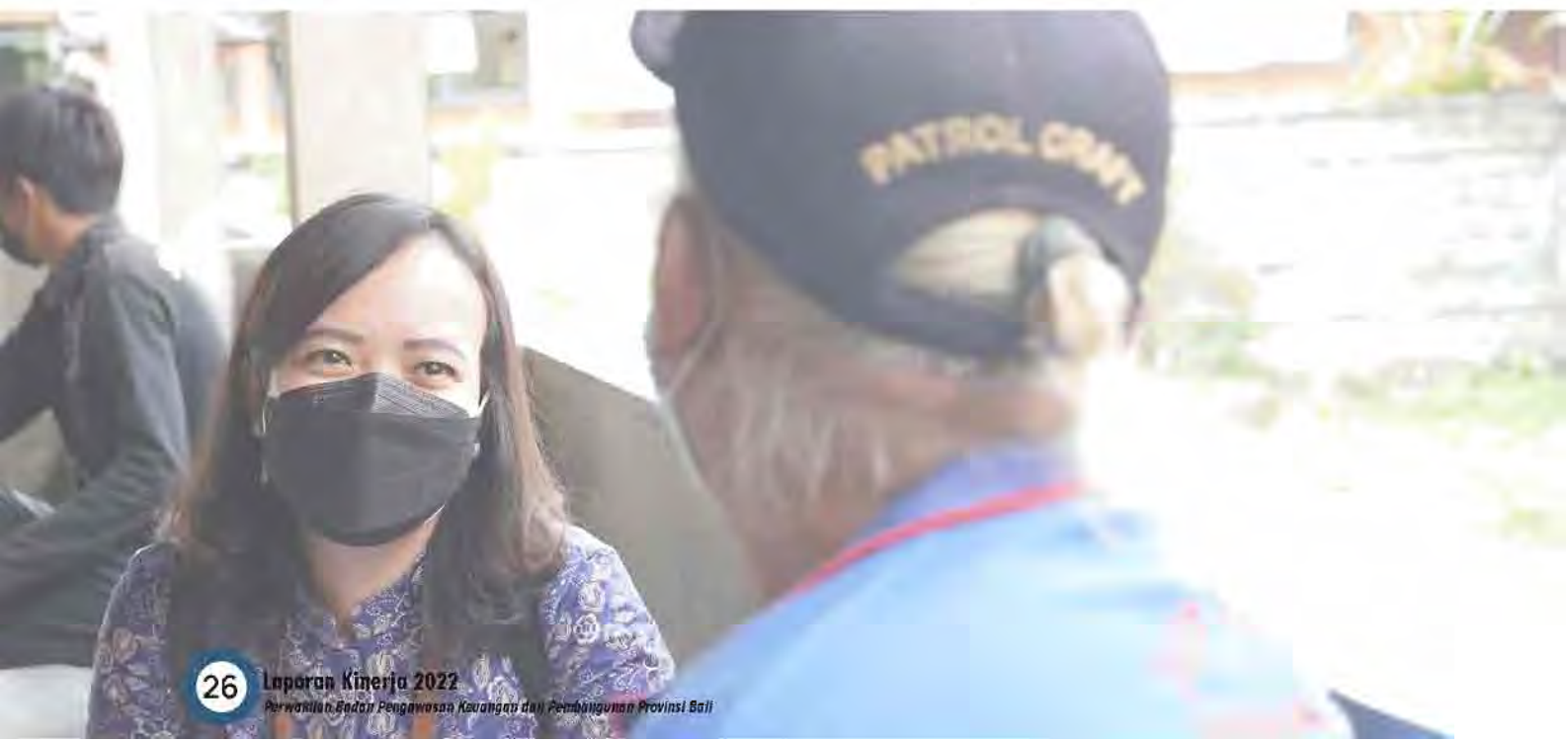
- a. Melakukan asistensi teknik pemeriksaan pajak kepada tim pajak pemerintah kabupaten;
- b. Melakukan sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

2.1.2 Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

IKK "Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah" menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat berdasarkan kegiatan pengawasan BPKP. Menilai efisiensi dan kesesuaian belanja dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku yakni:

- a Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan:
 1. Dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih berdampak atau lebih hemat
 2. Rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih berdampak atau lebih hemat
 3. Ukuran/indikator keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan berorientasi hasil
- b Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit klaim/verifikasi tagihan, koreksi *cost-recovery*, audit penyesuaian harga, audit *cost-saving*, dan sebagainya.

Realisasi IKK "Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah" tahun 2022 sebesar Rp438.685.448.675,58 atau tercapai 100,69% dari target Rp435.688.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan hasil pengawasan dengan rincian sebagaimana Tabel 3.4.



Tabel 3.4

Ringkasan Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah Tahun 2022

No.	Sasaran Pengawasan	Nilai (Rp)
1	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional	6.616.729.625,45
2	Perencanaan Penganggaran Daerah Pemda	426.985.996.762,00
3	Tunggakan Pembayaran Penanganan Darurat Satker OP SDA Bali-Penida	790.466.199,84
4	Pengawasan atas Akuntabilitas BUMN	4.234.836.088,29
5	Pekerjaan Pembangunan Gedung Blok Hunian di Lembaga Pemasarakatan (Lapas)	57.420.000,00
Total		438.685.448.675,58

Jenis pengawasan yang berkontribusi tinggi dalam mendukung pencapaian kinerja ini adalah penghematan keuangan negara/daerah lainnya, yang ditunjukkan melalui kegiatan pengawasan sebagai berikut:

1. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran, dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan, dan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
2. Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional, antara lain: Pekerjaan *Revetment* dan *Retaining Wall Dumping II* dan Dermaga Curah Cair di Pelabuhan Benoa, Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sanur, Pekerjaan Rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua, Pekerjaan Konstruksi dan Supervisi Pembangunan Embung Sanur, dan Pekerjaan Pembangunan Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng;
3. Pengawasan akuntabilitas BUMN, dilaksanakan atas penyusunan *Owner Estimate* (OE) dan proses pengadaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur pada PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan pekerjaan revitalisasi dan beautifikasi terminal internasional, domestik, *General Aviation Terminal* (GAT), serta fasilitas penunjang di Bandara I Gusti Ngurah Rai – Bali Tahun 2022;
4. Pengawasan atas pembayaran penanganan Darurat Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Bali-Penida (Proyek Penanganan Bencana Longsor Danau Batur) Tahun 2022; dan
5. Pengawasan atas pekerjaan pembangunan gedung blok hunian di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan Tahun Anggaran 2022.



Realisasi Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp16.911.961.324,42 atau 3,71% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp455.597.410.000,00. Realisasi tahun 2022 telah melampaui target akhir Renstra sebesar Rp112.930.000.000,00.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.2.



Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif dengan mitra kerja;
- b. Meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan keselarasan perencanaan pada pemerintah daerah;
- c. Meningkatkan kompetensi pegawai terkait pengawasan pekerjaan kontruksi dan pengadaan barang dan jasa.

2.1.3 Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

IKK "Nilai penyelamatan keuangan Negara" menunjukkan besarnya jumlah temuan pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah direalisasikan dan/atau pemulihan hak negara atas aset negara.

IKK ini diukur dengan nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan nilai aset yang dipulihkan, misalnya melalui kegiatan audit investigatif, audit PKKN, dan audit lainnya.

Realisasi IKK "Nilai penyelamatan keuangan Negara" tahun 2022 sebesar Rp5.307.471.386.680.000,00 atau tercapai 689,28% dari target Rp770.000.000,00. Ringkasan nilai penyelamatan keuangan negara tahun 2021 sebesar Rp5.307.471.386.680,00 disajikan sebagaimana Tabel 3.5.

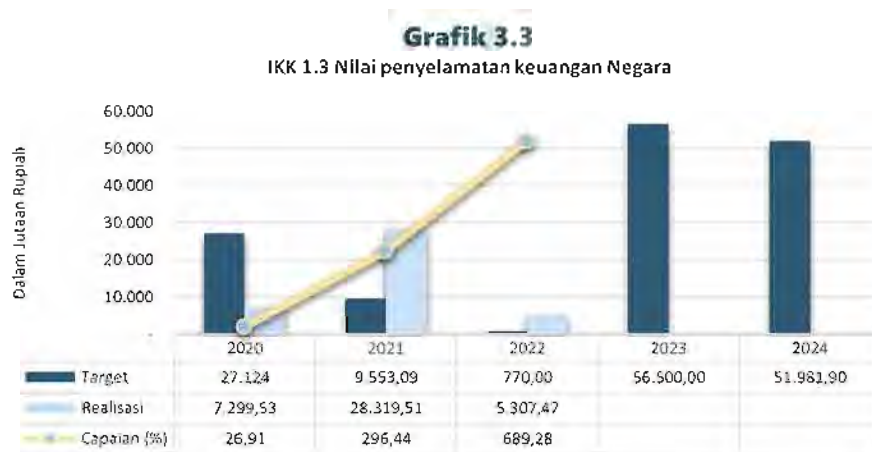
Tabel 3.5
Ringkasan Nilai Penyelamatan Keuangan Negara Tahun 2022

No.	Sasaran Audit	Nilai (Rp)
1	Audit PKKN	2.403.360.928
2	Audit Investigasi	2.636.184.467
3	DOISP II Loan IBRD No. 8711 ID dan Loan AIIB No. 000010-1-IDN	24.245.065

No.	Sasaran Audit	Nilai (Rp)
4	Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project WSLIC-3Pamsimas III Loan ID 8578	46.714.000
5	KOTAKU National Slum Upgrading Project NSUP IBRD Loan Number 8636 ID AIIB LN 0004-IDN	23.200.000
6	Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	20.950.827
7	Klaim Penggantian Pelayanan Pasien Covid-19	143.475.600
8	Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)	9.340.500
Total		5.307.471.386,68

Realisasi IKK "Nilai penyelamatan keuangan Negara" tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp23.012.036.818,25 atau 81,26% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp28.319.508.204,93. Realisasi tahun 2022 baru mencapai 10,21% dari target akhir Renstra sebesar Rp51,982milyar.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Nilai penyelamatan keuangan Negara" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.3.



Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain

1. Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) secara intensif agar kasus yang sedang ditangani dapat dikonsultasikan terlebih dahulu, guna meyakinkan layak/tidaknya kasus tersebut ditindaklanjuti dengan audit PKKN atau audit investigasi;
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar pemenuhan data dukung dapat dilaksanakan secara optimal mendukung penugasan;
3. Memantau pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan BPKP terkait dengan adanya koreksi/penyelamatan keuangan negara;
4. Memberdayakan Inspektorat daerah untuk melakukan kegiatan investigasi;
5. Melakukan kolaborasi dan sinergi dengan APH dan Inspektorat daerah.

Sasaran Kinerja 2

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” diindikasikan dalam capaian tiga IKK, yaitu:

1. Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi
3. Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional					
2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai Sesuai Target	PSN	2	4	200	■
2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Topik APPD	2	2	100	■
2.3	Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti	Persen	80	81,25	101,56	■
Rerata Capaian					133,85	

Tabel 3.6. di atas menunjukkan bahwa sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” memiliki capaian kinerja rata-rata yaitu sebesar 133,85% dari target tahun 2022. Uraian atas kinerja ketiga IKK sasaran kegiatan 2 sebagai berikut:

2.2.1 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target

IKK “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” menunjukkan jumlah Proyek Strategis Nasional yang mencapai target sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun tertentu yang diawasi dengan kegiatan pengawasan BPKP. Pengawasan dimaksudkan untuk menilai sejauhmana keberhasilan kegiatan prioritas nasional mencapai target yang ditetapkan. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target kinerja pada dokumen perencanaan yang sah.

Realisasi IKK “Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target” tahun 2022 adalah sebanyak empat PSN atau tercapai 200% dari target sebanyak dua PSN tercapai sesuai target. Empat PSN yang mencapai target yakni Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul, Pembangunan Bendungan Tamblang, Pembangunan Pelabuhan Sanur, dan Pembangunan Bendungan Sidan dari sebelas PSN yang diawasi dengan rincian sebagai berikut:



1. Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul Kabupaten Klungkung, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 per tanggal 20 Desember 2022 realisasi fisik telah mencapai 100,00% dari target sebesar 100,00%. Sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 100,00% atau sebesar Rp109.378.957.250,00 dari kontrak sebesar Rp109.378.957.250,00;
2. Pembangunan Pelabuhan Sanur, sampai dengan Triwulan IV per 20 Desember 2022 realisasi fisik telah mencapai 99,45% dari target 98,69%. Sedangkan realisasi keuangan telah mencapai Rp279.131.243.520,00 atau 71,31% dari nilai kontrak sebesar Rp391.433.110.259,00;
3. Pembangunan Bandar Udara Bali Utara, sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 (per 17 Juni 2022), belum ada realisasi karena belum ada kepastian terkait dengan lokasi proyek, ketersediaan lahan, pendanaan maupun pelaksanaan pembangunannya;
4. Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Rel Wilayah Badung-Buleleng, sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 (per 17 Juni 2022), masih dalam tahap kajian awal dan masih terus berubah serta tergantung pada perkembangan pembangunan Bandar Udara Bali Utara;
5. Pembangunan Bendungan Sidan, proyek yang meliputi 3 wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 per tanggal 20 Desember 2022 realisasi fisik telah mencapai 51,412% dari target sebesar 51,066%. Sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 58,633% atau sebesar Rp934.728.545.137,00 dari kontrak sebesar Rp1.594.200.546.137,00;
6. Pembangunan Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 per 20 Desember 2022, realisasi fisik telah mencapai 99,276% dari target sebesar 99,174%. Sedangkan realisasi keuangan telah mencapai Rp867.295.910.000,00 atau 100,00% dari nilai kontrak sebesar Rp867.295.910.000,00;
7. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bendungan Sidan, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 belum ada realisasi karena pembangunan Bendungan Sidan di Kabupaten Badung, Bangli dan Gianyar Provinsi Bali, belum selesai dibangun sebagai sumber air baku SPAM;

8. Sertifikasi Lahan, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 per 20 Desember 2022, realisasi kegiatan mencapai 14.502 sertifikat Kluster 1 (K1) atau 60,87% dari target yang ditetapkan Tahun 2022 sebesar 23.825 sertifikat Kluster 1 (K1). Realisasi keuangan atas SHAT PTSL pada Kantor wilayah BPN Provinsi Bali sampai dengan Triwulan IV per 22 Desember 2022 sebesar Rp1.891.737.350,00 atau 53,45% dari anggaran sebesar Rp3.539.400.000,00 dan SHAT Redistribusi sebesar Rp1.417.000,00 atau 85,16% dari anggaran sebesar Rp1.664.000,00;
9. Pengembangan Pelabuhan Benoa (*Bali Maritime Tourism Hub*), sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 per tanggal 30 Oktober 2022 realisasi fisik telah mencapai 51,86% dari target sebesar 64,56%. Sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 64,65% atau sebesar Rp671.452.667.230,00 dari kontrak sebesar Rp1.038.583.233.834,00;
10. Proyek Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 per 20 Desember 2022 belum ada realisasi karena masih dalam proses pembebasan lahan dan menunggu persetujuan Rencana Teknik Akhir dari Dirjen Bina Marga dan BPJT;
11. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Ustrik (PSEL) di Denpasar, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 (*cut off* per 31 Oktober 2022) proyek dihentikan sementara. Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) telah mengajukan permohonan pembatalan proyek kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI.

Realisasi IKK "Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target" maupun capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun akhir Renstra, karena tidak terdapat target IKK tersebut pada tahun 2021 dan tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.4.



Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait pemenuhan data yang mendukung pelaksanaan pengawasan;
2. Mendorong Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga agar melaksanakan pembangunan sesuai target dan mempercepat penyelesaian pembangunan agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

2.2.2 Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi

IKK "Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi" menunjukkan jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) tahun tertentu yang diawasi dengan kegiatan pengawasan BPKP. Pengawasan dimaksudkan untuk menilai sejauh mana keberhasilan kegiatan prioritas nasional daerah mencapai target yang ditetapkan. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan Kegiatan Prioritas Daerah yang diawasi dengan kegiatan pengawasan perwakilan pada tahun berjalan.

Realisasi IKK "Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi" tahun 2022 adalah sebanyak dua kegiatan atau tercapai 100% dari target sebanyak dua program. Dua kegiatan/program daerah yang diawasi sebagai berikut:

1. **Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung**
Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung merupakan program strategis yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Bali sejak Tahun 2019 dan termasuk dalam APPD 2022 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
Sampai dengan Tahun 2022 anggaran pembangunan PKB yang tersedia sebesar Rp1,5 Triliun (dari Pinjaman PEN) hanya cukup untuk pengadaan tanah dan pematangan lahan.
Sampai saat evaluasi (Triwulan III Tahun 2022) pembangunan PKB masih dalam tahap pematangan lahan.
PT. Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) yang telah ditetapkan sebagai pengelola PKB dengan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022, sampai saat evaluasi masih belum didirikan.
Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Bali tidak menganggarkan kegiatan pembangunan PKB, dan masa jabatan Gubernur akan berakhir tahun 2023.
2. **Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali**
Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan Dana Desa Adat melalui APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, kepada seluruh Desa Adat di Bali, yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing Desa Adat berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali.
Hasil evaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali:



- Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan peraturan/kebijakan untuk menguatkan kedudukan dan keberadaan desa adat di Bali.
- Dinas Pemajuan Masyarakat Adat adalah perangkat daerah (Lembaga yang dibentuk) yang berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyaluran dana desa adat, namun tidak memiliki kewenangan untuk mengatur Desa Adat. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali belum memiliki data keseluruhan jumlah Kahyangan Desa maupun Kahyangan Tiga (tempat suci) di tiap-tiap Desa Adat, data jumlah Krama (masyarakat) Desa Adat di tiap-tiap Desa Adat maupun data Wewidangan atau Wewengkon setiap Desa Adat di Bali.
- Desa Adat memiliki kewenangan otonom yang memperbolehkan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, memiliki Lembaga Pemerintahan Desa Adat terdiri atas unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan lembaga pengambilan keputusan, serta Lembaga pengembangan perekonomian kerakyatan berbasis nilai-nilai adat.
- Pada empat Desa Adat yang diuji petik pada Kabupaten Badung:
 - a) Terdapat tiga Bandesa Adat yang merupakan anggota dewan yaitu Bandesa Adat Ungasan, Bandesa Adat Abianbase dan Bandesa Adat Pecatu.
 - b) Penyaluran dana desa adat dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) Desa Adat sampai dengan akhir Caturwulan II Tahun 2022 disalurkan tepat waktu dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana Juknis Pemanfaatan Dana desa adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.
 - c) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa adat oleh Desa Adat. Untuk memudahkan penatausahaan keuangan Desa Adat, Pemerintah Provinsi Bali telah membuat aplikasi SIKUAT (Sistem Informasi Keuangan Desa Adat). Namun belum semua fitur dalam aplikasi tersebut dapat digunakan. Fitur yang sudah dapat digunakan adalah fitur input Rencana Anggaran Tahunan (RAT) Desa Adat dan perubahan, dan untuk fitur Realisasi Pendapatan, Penarikan Uang Kas dan Realisasinya.

- Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan desa adat khususnya untuk sub kegiatan penyaluran dana penguatan Desa Adat di Bali pada DPA Dinas PMA menggunakan nomenklatur belanja pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 sebanyak 1.493 desa adat dan penggunaannya diatur dengan petunjuk teknis.

Pemilihan nomenklatur tersebut tidak sesuai, karena dana desa adat yang disalurkan bukan berupa barang dan jasa melainkan berupa uang.

Sebagai alternatif solusi atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan Dana desa adat tersebut ke dalam Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2023.

Realisasi maupun capaian IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun akhir Renstra, karena tidak terdapat target IKK tersebut pada tahun 2021 dan tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.5.



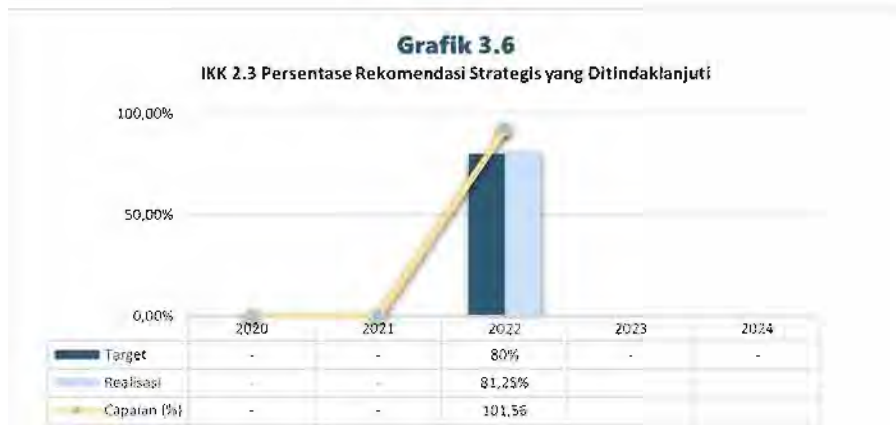
2.2.3 Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti

IKK “Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti” menunjukkan sejauh mana Perwakilan dapat menghasilkan Rekomendasi Strategis disampaikan kepada para stakeholder yaitu pemerintah daerah terkait dengan perbaikan akuntabilitas dan tata kelola keuangan pemerintahan. IKK ini diukur dari pembagian jumlah rekomendasi strategis yang telah ditindaklanjuti oleh stakeholders dengan jumlah rekomendasi strategis yang disampaikan atas hasil pengawasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

Realisasi IKK “Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti” tahun 2022 adalah 81,25% atau tercapai 101,56% dari target sebesar 80%. Dari 32 rekomendasi yang disampaikan sebanyak 26 rekomendasi telah ditindaklanjuti.

Realisasi IKK “Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti” maupun capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun akhir Renstra, karena tidak terdapat target IKK tersebut pada tahun 2021 dan tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti” tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.6.



Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah/Kementerian/Lembaga secara berkala;
2. Meningkatkan koordinasi dengan APIP Pemerintah Daerah untuk turut serta mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

Sasaran Kinerja 3

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

Pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” diindikasikan dalam capaian empat IKK, yaitu:

1. Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat
2. Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat
3. Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan
4. Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi Pada Perekonomian Desa



Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha					
3.1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	BUMD	9	9	100,00	■
3.2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	BLUD	1	2	200,00	■
3.3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	BUMDes	27	59	218,52	■
3.4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	BUMDes	8	10	125,00	■
Rerata Capaian					160,88	

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah mendorong meningkatnya pengawasan pembangunan atas Badan Usaha. Dengan demikian sasaran kegiatan "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha" telah melampaui target dengan capaian sebesar 160,88% dari target kinerja tahun 2022.

Uraian masing-masing IKK sasaran kegiatan ini sebagai berikut:

2.3.1 Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

IKK "Jumlah BUMD dengan kinerja sehat" menunjukkan jumlah BUMD dengan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun assessor lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori "Sehat". Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan untuk mendukung IKK ini antara lain melakukan audit/evaluasi kinerja pada BUMD dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi AOI yang diberikan. IKK ini diukur dengan menjumlahkan BUMD dengan kinerja minimal "Sehat" pada tahun berjalan.

Realisasi IKK "Jumlah BUMD dengan kinerja sehat" pada tahun 2022 sebanyak 9 BUMD atau 100,00% dari target 9 BUMD. Realisasi tersebut diperoleh dari hasil penilaian kinerja Tahun Buku 2021 atas 9 BUMD di wilayah Provinsi Bali, yang seluruhnya memperoleh predikat "Sehat" atau nilai kriteria tingkat kesehatan di atas 2,9. Sembilan BUMD tersebut meliputi:

1. Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung;
2. Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli;
3. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng;
4. Perumda Air Minum Tirta Amerta Jati Kabupaten Jembrana;
5. Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar;
6. Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem;
7. Perumda Air Minum Panca Mahottama Kabupaten Klungkung;
8. Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan;
9. Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar.

Realisasi IKK ini sama dengan tahun 2021, yakni sebanyak 9 BUMD memperoleh predikat kinerja "Sehat".

Realisasi IKK tahun 2022 sebanyak 9 BUMD dengan kinerja sehat atau 100% dari target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 9 BUMD. Dengan demikian capaian kinerja ini perlu dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain dengan merencanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait kinerja BUMD.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.7.



2.3.2 Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat



IKK "Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat" menunjukkan banyaknya BLUD dengan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun assessor lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori "Sehat". Kegiatan pengawasan untuk mendukung IKK ini yakni melakukan audit kinerja pada BLUD dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi AOL yang diberikan. IKK ini diukur dengan menjumlahkan BLUD dengan kinerja minimal "Sehat" pada tahun berjalan.

Realisasi IKK "Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat" pada tahun 2022 sebanyak 2 BLUD dengan kinerja sehat atau 200% dari target 1 BLUD. Realisasi tersebut merupakan hasil atas evaluasi kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya Kota Denpasar Tahun 2021 dan Universitas Udayana Tahun 2021 dengan kinerja baik/sehat.



Realisasi IKK tahun 2022 sebanyak dua BLU/D dengan kinerja sehat, meningkat satu BLU/D dari realisasi tahun 2021 sebanyak satu BLU/D. Realisasi tahun 2022 telah melampaui target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar satu BLU/D. Dengan demikian capaian kinerja ini perlu dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja antara lain dengan merencanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait kinerja BLUD.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.8.



2.3.3 Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan

IKK "Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan" menunjukkan BUMDes yang dapat menyusun laporan keuangan setelah adanya kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dari BPKP. Kegiatan untuk mendukung IKK ini antara lain kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada BUMDes dan memantau perkembangan BUMDes dalam usahanya menyusun laporan keuangan.

Realisasi IKK pada tahun 2022 sebanyak 59 BUMDes telah mampu menyusun laporan keuangan, atau 218,52% dari target sebanyak 27 BUMDes. Sebaran 59 BUMDes tersebut sebagai berikut:

- a. Kota Denpasar sebanyak 14 BUMDes
- b. Kabupaten Buleleng sebanyak 15 BUMDes
- c. Kabupaten Badung sebanyak 40 BUMDes

Realisasi dan capaian IKK Tahun 2022 sebanyak 59 BUMDes meningkat 41 BUMDes atau 227,78% dari realisasi Tahun 2021 sebanyak 18 BUMDes. Realisasi IKK tahun 2022 telah melampaui target akhir Renstra Tahun 2024 sejumlah 38 BUMDes.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja antara lain dengan merencanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait kinerja BUMDes.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.9.



2.3.4 Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa

IKK "Jumlah BUMDes yang Mampu Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa" menunjukkan kemampuan BUMDes yang dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan pendapatan/ perekonomian desa berupa sumbangan Pendapatan Asli Desa (PA Desa). Kegiatan untuk mendukung IKK ini antara lain kegiatan sosialisasi/ pembinaan/pendampingan pengembangan potensi desa dan akuntabilitas tata kelola keuangan BUM Desa.

Realisasi IKK pada tahun 2022 sebanyak 10 BUMDes, atau 125% dari target sebanyak 8 BUMDes. Sepuluh BUMDes yang telah memberikan kontribusi pada perekonomian desa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan antara lain:

No.	Nama BUM Desa	Nilai Kontribusi Pendapatan Asli Desa (Rp)
BUM Desa di Kota Denpasar:		
1	BUM Desa Sari Sedana Mertha Desa Pemogan	10.831.647,02
2	BUM Desa Saka Mandiri Desa Sanur Kaja	37.014.487,80
3	BUM Desa Pemecutan Kaja Mandiri	37.250.253,56
4	BUM Desa Sari Amreta Sudha, Desa Sidakarya	2.311.611,18
5	BUM Desa Panca Artha Mandiri Desa Dangin Puri Kauh	34.834.499,16
BUM Desa Kabupaten Jembrana		
1	BUM Desa Abdi Rahayu, Desa Yeh Embang Kangin	22.734.954,30

No.	Nama BUM Desa	Nilai Kontribusi Pendapatan Asli Desa (Rp)
2	BUM Desa Tirta Rahayu, Desa Yeh Sumbul	51.622.000,00
3	BUM Desa Sari Sedana, Desa Perancak	199.413.520,00
4	BUM Desa Karya Usaha Bakti, Desa Budeng	71.842.000,00
5	BUM Desa Amertha Bhuana, Desa Yeh Kuning	93.415.211,44
Total		561.270.184,46

Realisasi maupun capaian IKK ini, tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dan akhir Renstra Tahun 2024, karena tidak terdapat IKK tersebut pada tahun 2021 dan tahun 2024.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja antara lain dengan merencanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait kinerja BUMDes.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BUMDes yang Mampu Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.10.



Sasaran Kinerja 4

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Pencapaian sasaran kegiatan "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi" diindikasikan dalam capaian empat IKK, yaitu:

1. Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti
2. Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti
3. Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik
4. Jumlah Pemda Menindaklanjuti *Area Of Improvement* dari Hasil Pengukuran EPK

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan
atas Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi					
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00	■
4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80	100	125,00	■
4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3	1	33,33	■
4.4	Jumlah Pemda menindaklanjuti <i>Area Of Improvement</i> dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1	3	300,00	■
Rerata Capaian					139,58	

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah mendukung efektivitas pengendalian korupsi. Dengan demikian sasaran kegiatan "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi" telah melampaui target dengan capaian sebesar 139,58% dari target kinerja tahun 2022. Uraian masing-masing IKK sasaran kegiatan ini sebagai berikut:

2.4.1 Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan /Ditindaklanjuti

Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang berorientasi represif dalam konteks pengendalian korupsi meliputi pelaksanaan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), pemberian keterangan ahli, dan audit dengan tujuan tertentu lainnya bidang investigasi.

Yang dimaksud K/L/P/BU menindaklanjuti hasil pengawasan represif dalam indikator ini adalah K/L/P/BU dan atau instansi penegak hukum yang meminta penugasan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebagaimana tertuang di dalam laporan hasil audit.

Dalam hal penerimaan penugasan yang bersumber dari APH, tindak lanjut dimaksud adalah digunakannya laporan hasil audit sebagai salah satu alat bukti dalam berkas penyidikan/penuntutan. Dalam hal penerimaan penugasan bersumber dari K/L/P/BU, tindak lanjut dimaksud adalah tindakan korektif dan/atau tindak lanjut hukum sebagaimana dinyatakan dalam rekomendasi. Indikator Kinerja tersebut diukur dengan rumus:



*Jumlah KLPBU/ APH yang menindaklanjuti rekomendasi
Jumlah penugasan pengawasan represif*

Realisasi IKK "Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti" pada tahun 2022 sebesar 100% atau 100% dari target. Realisasi tersebut terdiri dari hasil pengawasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas 3 kasus dugaan TPK, Audit Investigasi sebanyak 1 kasus dan pemberian keterangan ahli di persidangan sebanyak 11 kali, yang seluruhnya telah ditindaklanjuti.

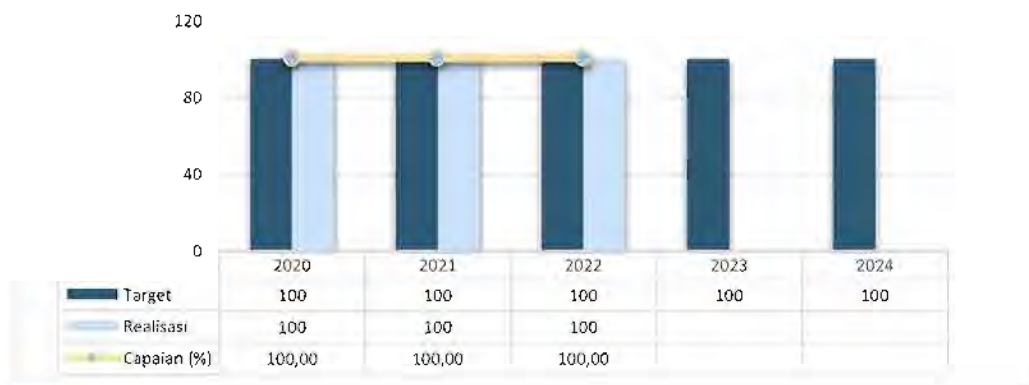
Realisasi maupun capaian IKK "Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti" sebesar 100%, sama dengan realisasi tahun 2021 dan target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 100%.

Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain menginventarisir kasus di Provinsi Bali yang telah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP yang memiliki potensi dapat dilakukan pemberian keterangan ahli di persidangan dan berkoordinasi dengan APH untuk pemberian keterangan ahli.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.11.

Grafik 3.11

IKK 4.1 Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti



2.4.2 Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Upaya pencegahan dan pengendalian korupsi tersebut dapat diklasifikasi dalam tiga strategi: edukatif, preventif dan represif. Strategi edukatif bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman, perilaku serta budaya anti korupsi melalui proses pembelajaran informal yang terstruktur. Strategi ini menjadikan pembelajaran sebagai faktor kunci pemberantasan korupsi, disamping proses preventif dan represif. Proses ini dilaksanakan melalui pembentukan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK).



Melalui pembelajaran informal yang terstruktur akan terjadi proses interaksi pemikiran dan pengetahuan, melahirkan individu yang mengerti dan memahami korupsi dan anti korupsi, selanjutnya termotivasi untuk melakukan tindakan anti korupsi melalui sarana sistem pengaduan internal. Dengan berjalannya waktu, melalui proses interaksi peserta belajar di lingkungan organisasinya diharapkan terjadi proses pembiasaan perilaku anti korupsi yang mengarah pada pembentukan budaya organisasi anti korupsi.

Strategi preventif bertujuan mencegah terjadinya korupsi melalui penerapan sistem yang mampu mengendalikan korupsi melalui *Fraud Control Plan* (FCP) maupun *Fraud Risk Assessment* (FRA). Sistem diibaratkan sebagai lingkungan yang memiliki daya cegah bagi individu yang memiliki motivasi bertindak koruptif. Berbagai atribut dalam FCP dirancang untuk mewujudkan lingkungan yang anti korupsi tersebut.

IKK "Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti" diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah KLPBU yang menindaklanjuti rekomendasi}}{\text{Jumlah KLPBU sasaran pengawasan edukatif dan preventif}}$$

Realisasi IKK ini pada tahun 2022 sebesar 100% atau 125,00% dari target sebesar 80%. Dari tujuh KLPBU sasaran telah menindaklanjuti rekomendasi, sebagai berikut:

- MPAK, dengan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai sasaran kegiatan.
- Coaching Clinic*, dengan sasaran 2 KLPBU yaitu Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Provinsi Bali.
- Profiling* Risiko Kecurangan atau *Fraud Risk Assesment* (FRA), dilaksanakan sebanyak lima kegiatan dengan sasaran empat KLPBU, yaitu Kantor Kesyahbandaran Operasional Pelabuhan Benoa Kelas II, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kota Denpasar.

Realisasi IKK tahun 2022 sebesar 100%, sama dengan realisasi tahun 2022 dan telah melampaui target akhir renstra tahun 2024 sebesar 90%.

Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain perlu berkoordinasi dengan K/L/P/K yang berpotensi termotivasi untuk melakukan tindakan anti korupsi.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.12.



2.4.3 Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

IKK “Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” menunjukkan besarnya skor indeks efektivitas pengendalian korupsi yang merupakan komposit skor atas tiga pilar: kapabilitas, keberterapan (*implementedness*) strategi pencegahan, dan penanganan keterjadian.

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP terintegrasi disamping pembobotan penilaian atas SPIP, kapabilitas APIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI). Pengendalian korupsi/kecurangan atau dikenal dengan *Fraud Control Plan* akan bermuara pada efektivitas pengendalian korupsi, karena atribut FCP merupakan indikator dari IEPK. Membangun FCP berarti meningkatkan pencapaian IEPK. IKK “Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” diukur dengan jumlah pemda yang mendapatkan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi minimal sebesar 3,000 berdasarkan nilai validasi dari tim panel BPKP.

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian IEPK dalam rangka mencapai target kegiatan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Provinsi Bali, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melakukan bimbingan teknis peningkatan IEPK pada pemerintah daerah di Bali.



- Kegiatan asesmen risiko mencakup identifikasi skenario/modus dan penyebab korupsi, menghasilkan peta risiko korupsi, dan menghasilkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) spesifik sebagai langkah mitigasi belum diterapkan pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Kurangnya keterlibatan para pimpinan OPD dan pejabat terkait menjadi kunci keberhasilan dalam membangun budaya organisasi anti korupsi, diharapkan terbentuk persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional (etika prinsip).

Realisasi IKK tahun 2022 sebanyak satu pemda tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 karena tidak terdapat IKK ini pada tahun 2021. Realisasi tahun 2022 mencapai 25% dari target akhir renstra tahun 2024 sebanyak empat pemda. Dengan demikian perlu upaya lebih keras lagi untuk mencapai target tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.13.



Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

1. Memberikan kegiatan bimbingan teknis, FGD, sosialisasi FRA, FCP dan workshop anti korupsi untuk mendorong peningkatan nilai IEPK.
2. Mendorong penyusunan kebijakan pengendalian kecurangan terutama komitmen pimpinan Kepala Daerah se-Provinsi Bali untuk melakukan internalisasi kebijakan tersebut.
3. Menginformasikan kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan internalisasi budaya organisasi terkait masalah penguatan nilai-nilai integritas pada semua pegawai dan penumbuhkembangan paradigma/nilai baru antikorupsi yang terintegrasi dengan sistem yang sudah ada.
4. Mendorong pembentukan Masyarakat Pembelajar Antikorupsi (MPAK) dan Komunitas Pembelajar Antikorupsi (KomPAK) dan bukti nyata edukasi yang telah dilakukan oleh tim KomPAK.

2.4.4 Jumlah Pemda Menindaklanjuti Area Of Improvement dari Hasil Pengukuran EPK

IKK "Jumlah Pemda menindaklanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK" menunjukkan Pemda yang di Bimtek telah menindaklanjuti *Area Of Improvement* melalui penginputan parameter pada Aplikasi SPIP terintegrasi. Kegiatan untuk mendukung IKK ini antara lain kegiatan *diagnostic assessment* dan bimbingan teknis peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Realisasi IKK tahun 2022 sebanyak tiga Pemda telah menindaklanjuti Aol hasil pengukuran EPK, atau sebesar 300% dari target tahun 2023 sebanyak satu Pemda. Pemda yang menindaklanjuti Aol hasil peningkatan IEPK adalah Pemerintah Kabupaten Bangli, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Rekomendasi atas Aol berupa penyusunan kebijakan pengendalian kecurangan dan Fraud Risk Assesment (FRA) telah ditindaklanjuti oleh ketiga pemda tersebut diatas, antara lain:

1. Peraturan Bupati Bangli Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1476/HK/2022 tentang Rencana Pengendalian Kecurangan/Fraud di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
3. Register Risiko Kecurangan pada ketiga pemda tersebut.



Realisasi IKK tahun 2022 tiga Pemda, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021 sebanyak satu Pemda. Realisasi tahun 2022 mencapai 75% dari target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak empat Pemda. Dengan demikian capaian kinerja ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja antara lain dengan melakukan sinergi intern perwakilan dalam melakukan pendampingan dan bimbingan teknis SPIP.

1. Meningkatkan komitmen para kepala daerah dan semua ASN untuk mencegah dan memberantas korupsi, mulai dari terbitnya kebijakan/regulasi kepala daerah, penguatan fraud control plan (FCP), penguatan SPIP, sampai terwujudnya budaya organisasi anti korupsi.
2. Mengedukasi masyarakat dan ASN mengenai dampak korupsi terhadap kelancaran pembangunan nasional melalui kegiatan sosialisasi, forum/rapat-rapat pimpinan, oleh APIP maupun Tim KomPAK yang dibentuk oleh Pemda
3. Memberdayakan Inspektorat Daerah dalam merespon kejadian kecurangan di wilayah masing-masing baik melalui audit investigatif, penghitungan kerugian keuangan negara maupun pemberian keterangan ahli.

4. Penguatan kapabilitas APIP daerah, terutama masalah SDM, anggaran dan peningkatan peran layanannya.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Pemda menindaklanjuti *Area Of Improvement* dari hasil pengukuran EPK" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.14.



Sasaran Kinerja 5

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

Pencapaian sasaran kegiatan "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU" diindikasikan dalam capaian 12 IKK, yaitu:

1. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
2. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
3. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
5. Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3
6. Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3
7. Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah
8. Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel
9. Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai
10. Jumlah BUMD dengan MRI $>$ Level 3
11. Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3
12. Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3



Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU					
5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1	1	100,00	■
5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	7	7	100,00	■
5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1	1	100,00	■
5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	9	9	100,00	■
5.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Prov	1	1	100,00	■
5.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	3	3	100,00	■
5.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	4	3	75,00	■
5.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20	636	3.180,00	■
5.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	20	30	150,00	■
5.10	Jumlah BUMD dengan MRI $>$ Level 3	BUMD	1	1	100,00	■
5.11	Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3	BLU/D	3	3	100,00	■
5.12	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLU/D	1	1	100,00	■
Rerata Capaian					382,27	

Tabel 3.9 menunjukkan bahwa pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah mendorong peningkatan kualitas pengendalian intern K/L/P/BU dengan capaian sebesar 382,27% dari target kinerja tahun 2022. Uraian masing-masing IKK sasaran kegiatan ini sebagai berikut:

2.5.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Tiga komponen penilaian yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif, meliputi Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*). Komponen *enabler* terdiri dari 5 elemen yaitu Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola. Komponen Aktivitas Pengawasan merupakan peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan *stakeholders* lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui aktivitas pengawasan intern berupa asurans dan jasa konsultansi. Sedangkan kualitas hasil pengawasan di atas terlihat dari temuan pengawasan APIP, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi APIP, pemanfaatan hasil pengawasan APIP

oleh manajemen K/L/D dan *stakeholders* lainnya, derajat integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang dibangun dari berbagai kegiatan asurans, serta atensi dan rencana aksi yang dibangun dari berbagai jasa konsultansi APIP

Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas yang dilaksanakan sendiri/penilaian mandiri oleh APIP K/L/Pemda menggunakan pedoman penilaian kapabilitas APIP, yang selanjutnya dievaluasi oleh BPKP.

IKK "Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3" mencerminkan bahwa hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.

Inspektorat Provinsi Bali telah berada pada level 3. Dengan demikian, realisasi IKK "Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3" pada tahun 2022 sebanyak 1 APIP atau tercapai 100% dari target sebesar 1 APIP.

Realisasi IKK Tahun 2022 sebanyak 1 APIP Provinsi, sama dengan realisasi tahun 2021 dan target akhir Renstra Tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.15.



2.5.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Sebagaimana IKK Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3, IKK "Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3" juga mencerminkan bahwa hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.

Realisasi IKK "Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3" di Provinsi pada tahun 2022 sebanyak 7 APIP atau tercapai 100% dari target sebesar 7 APIP. APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 3 sebagaimana Tabel 3.10 berikut:

Tabel 10
Level Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Kota

No.	Nama APIP	Level	Status
APIP yang berada pada level 3:			
1	Inspektorat Kabupaten Badung	3	Telah terbit SP Deputi
2	Inspektorat Kabupaten Tabanan	3	
3	Inspektorat Kabupaten Klungkung	3	
4	Inspektorat Kota Denpasar	3	
5	Inspektorat Kabupaten Gianyar	3	
6	Inspektorat Kabupaten Bangli	3	
7	Inspektorat Kabupaten Buleleng	3	
APIP yang berada pada 2+:			
1	Inspektorat Kabupaten Jembrana	2+	Telah terbit SP Deputi
2	Inspektorat Kabupaten Karangasem	2+	

Topik Kapabilitas APIP yang memerlukan perbaikan:

No.	Elemen	Nama Topik	Jumlah APIP
1	Elemen Pengelolaan SDM	Pengembangan SDM	1
2	Elemen Praktik Profesional	Perencanaan Pengawasan	1
		Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	1
3	Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Sistem Pengukuran Kinerja APIP	1
4	Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi	Hubungan APIP dengan Manajemen	1
		Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	1
5	Elemen Peran dan Layanan	Audit Ketaatan	1
		Audit Kinerja	2
		Jasa Konsultansi	1

Realisasi IKK tahun 2022 sebanyak 7 APIP, meningkat 40% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebanyak 5 APIP. Realisasi tahun 2022 mencapai 77,78% dari target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 9 Pemda. Dengan demikian capaian kinerja ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.16.



Rencana tindak selanjutnya dalam meningkatkan kapabilitas APIP Pemda antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi secara intensif untuk membangun komitmen manajemen Pemda dan pimpinan APIP untuk:
 - a. Memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemenuhan kebutuhan SDM dan penyediaan anggaran yang memadai;
 - b. Melaksanakan pengawasan dengan fokus mencapai keberhasilan visi dan misi kepala daerah dengan mempertimbangkan risiko program;
 - c. Meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat dan sertifikasi profesi.
- 2) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengawasan antar bidang untuk kegiatan yang berkaitan di intern Perwakilan BPKP Provinsi Bali agar dapat membimbing dan mengawal Pemda dalam mengambil langkah tepat dan selaras sehingga tujuan pengawasan dan manajemen Pemda dapat dicapai secara efektif;
- 3) Melakukan pemantauan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pemda;
- 4) Meningkatkan frekuensi kegiatan pendampingan peningkatan kapabilitas APIP.

2.5.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Maturitas SPIP K/L/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Level 3 merupakan tingkat minimal maturitas SPIP yang diharapkan dicapai oleh K/L/Pemda. Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah.

IKK "Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" mencerminkan jumlah Provinsi dengan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. IKK ini diukur dengan menjumlahkan provinsi pada wilayah kerja pengawasan dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3.

Realisasi IKK "Jumlah provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" tahun 2022 adalah sebanyak 1 Pemda atau tercapai 100% dari target 1 Pemda.

Realisasi IKK sebanyak 1 pemerintah provinsi, sama dengan realisasi tahun 2021 dan target akhir Renstra Tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.17.



2.5.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

IKK "Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" mencerminkan jumlah Kabupaten/Kota dengan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. IKK ini diukur dengan menjumlahkan Kabupaten/Kota pada wilayah kerja pengawasan dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3.

Realisasi IKK "Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" tahun 2022 adalah sebanyak 9 kabupaten/kota atau tercapai 100% dari target 9 kabupaten/kota.

Realisasi IKK sebanyak 9 kabupaten/kota, sama dengan realisasi tahun 2021 dan target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 9 kabupaten/kota. Dengan demikian capaian ini perlu dipertahankan.

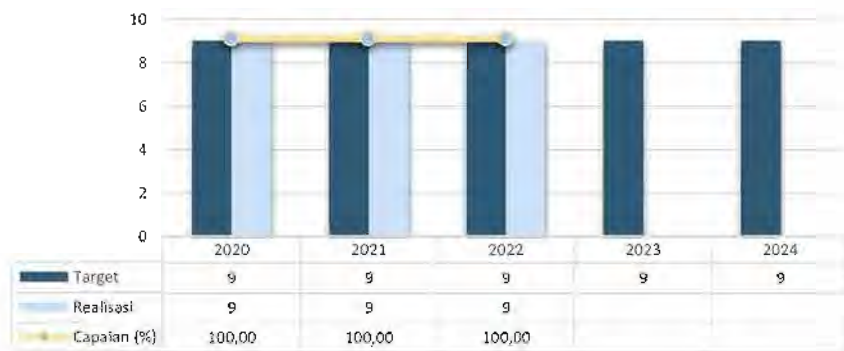
Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.18.





Grafik 3.18

IKK 5.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3



2.5.5 Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3

IKK "Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3" mencerminkan jumlah Pemda yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3. IKK ini diukur dengan menjumlahkan Pemerintah Provinsi yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko.

Realisasi IKK "Jumlah Pemerintah Provinsi dengan MRI \geq Level 3" tahun 2022 adalah sebanyak satu pemerintah provinsi atau tercapai 100% dari target satu pemerintah provinsi.

Realisasi IKK ini sebanyak satu Pemprov, sama dengan realisasi tahun 2021 dan target akhir Renstra Tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.19.

Grafik 3.19

IKK 5.5 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3



2.5.6 Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3

IKK "Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3" mencerminkan jumlah Pemda Kabupaten/Kota yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3. IKK ini diukur dengan menjumlahkan Pemda Kab/Kota yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko.

Realisasi IKK "Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3" tahun 2022 adalah sebanyak tiga kab/kota atau tercapai 100% dari target tiga kab/kota. Ketiga pemerintah daerah dengan MRI \geq Level 3 yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan. Sampai dengan Desember 2022 telah dilaksanakan bimbingan teknis manajemen risiko pada empat pemda yaitu Pemerintah Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Karangasem.

Realisasi IKK sebanyak tiga kabupaten/kota, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang belum ada realisasi kabupaten/kota dengan MRI \geq Level 3. Realisasi IKK Tahun 2022 mencapai 60% dari target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 5 kabupaten/kota. Dengan demikian kinerja dalam mendukung pencapaian target IKK ini perlu ditingkatkan lagi.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.20.



2.5.7 Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

IKK "Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah" menunjukkan tingkat akuntabel (efisien dan efektif) pemda dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB. IKK ini diukur dengan menjumlahkan pemda yang memperoleh Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

Realisasi tahun 2022 sebanyak tiga Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB atau 75% dari target Tahun 2022 sebanyak empat pemda.

Perolehan opini dan nilai SAKIP Pemda di wilayah Provinsi Bali yang mendapat opini WTP dan SAKIP BB adalah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung sebagaimana Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Opini LKPD dan Hasil Evaluasi SAKIP Pemda

No.	Pemerintah Daerah	Opini LKPD Tahun 2021	Hasil Evaluasi SAKIP TA 2021
Predikat WTP dan SAKIP BB			
1	Provinsi Bali	WTP	BB
2	Kota Denpasar	WTP	BB
3	Kabupaten Badung	WTP	BB
Predikat WTP dan SAKIP B			
1	Kabupaten Tabanan	WTP	B
2	Kabupaten Klungkung	WTP	B
3	Kabupaten Gianyar	WTP	B
4	Kabupaten Buleleng	WTP	B
5	Kabupaten Jembrana	WTP	B
6	Kabupaten Karangasem	WTP	B
7	Kabupaten Bangli	WTP	B

Realisasi IKK ini sama dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 3 Pemda. Realisasi IKK sejumlah tiga pemda atau 30% dari target akhir Renstra tahun 2024 sebanyak 10 pemda. Dengan demikian diperlukan upaya lebih untuk mempertahankan capaian dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain mendorong Pemerintah Daerah untuk:

- 1) Memantau keselarasan perencanaan dan penganggaran setiap tahun dengan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan perencanaan pembangunan nasional;
- 2) Membangun mekanisme/sistem informasi yang memadai guna memantau keselarasan perencanaan dan pemenuhan kriteria SMART pada indikator dan target kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah.



Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.21.



2.5.8 Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel

IKK "Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel" menunjukkan tingkat ketaatan pemerintah desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan. IKK dihitung dengan menjumlahkan desa yang telah mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Realisasi IKK "Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel" tahun 2022 sebanyak 636 desa atau seluruh desa di Provinsi Bali telah menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0 dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangannya dan telah melaksanakan secara online. Dengan demikian capaian IKK ini sebesar 3.180% dari target 20 desa.

Faktor pendukung capaian IKK ini adalah:

- 1) BPKP Provinsi Bali memiliki grup Parikrama Desa yang sarana komunikasi dan konsultasi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat maupun Desa.
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di setiap pemerintah daerah mendukung pelaksanaan siskeudes;
- 3) Admin siskeudes di setiap pemerintah daerah aktif melaksanakan diskusi dan konsultasi terkait kendala yang dihadapi terkait



Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain:

1. Menyediakan media konsultasi perangkat daerah yang terkait dengan pembinaan desa dalam rangka pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi siskeudes;
2. Melakukan monitoring realisasi belanja desa setiap semester;
3. Melakukan evaluasi setiap triwulan pada beberapa desa sampel;
4. Meningkatkan pemantauan atas penggunaan aplikasi Siskeudes secara *online*.

Realisasi IKK ini sama dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 636 desa menyusun laporan pertanggungjawaban. Realisasi IKK tahun 2022 sebanyak 636 desa atau 100% dari target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 636 desa.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.22.



2.5.9 Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai

Perbandingan IKK "Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai" mencerminkan sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan. IKK ini diukur dengan menghitung jumlah desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan.

Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pengelolaan aset desa sebanyak 30 desa telah menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai. Dengan demikian, pada tahun 2022 IKK ini terealisasi 30 desa atau 150% dari target 20 desa. Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai di Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

1) Pemuteran	11) Banyuatis	21) Sekumpul
2) Celukanbawang	12) Gobleg	22) Bungulan
3) Sumberkima	13) Munduk	23) Depeha
4) Unggahan	14) Gitgit	24) Tamblang
5) Bubunan	15) Pegadungan	25) Mengening
6) Munduk bestala	16) Sambangan	26) Bengkala
7) Gunungsari	17) Kalibukbuk	27) Julah
8) Subuk	18) Pamaron	28) Tejakula
9) Busungbiu	19) Alasangker	29) Les
10) Umejero	20) Sangsit	30) Madenan

Realisasi IKK 30 desa atau 4,72% dari target akhir Renstra tahun 2024 sebanyak 636 desa. Dengan demikian diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain:

- ① Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan aset desa sembari memberi pemahaman kepada perangkat desa akan pentingnya pengelolaan aset desa yang baik;
- ② Menerima konsultasi perangkat daerah yang terkait dengan pembinaan desa dalam rangka pengelolaan aset desa.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.23.



2.5.10 Jumlah BUMD dengan MRI > Level 3

BUMD dengan MRI \geq Level 3 tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis, menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.

IKK "Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3" mencerminkan jumlah BUMD yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3. IKK ini diukur dengan menjumlahkan BUMD yang mengimplementasikan pengelolaan risiko/ manajemen risiko dengan capaian MRI \geq Level 3.

Realisasi IKK "Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3" tahun 2022 adalah sebanyak 1 BUMD atau tercapai 100% dari target 1 BUMD. Hasil penilaian BUMD dengan MRI level 3 diperoleh berdasarkan hasil mapping penilaian penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Rendal Pusat Bidang Akuntan Negara. BUMD di wilayah Provinsi Bali dengan MRI \geq Level 3 adalah Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar.

Faktor penghambat pencapaian kinerja ini karena sebagian besar kesiapan BUMD dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik belum memadai sehingga masih sangat dibutuhkan upaya teknis dalam rangka mendorong penerapan manajemen risiko (MR).

Realisasi maupun capaian IKK ini, tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021, karena tidak terdapat IKK tersebut pada tahun 2021.

Jika melihat target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 4 BUMD, diperlukan upaya lebih keras lagi dalam meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan merencanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk mendorong BUMD dalam penerapan manajemen risiko.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.24.



2.5.11 Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3

BLU/D dengan MRI \geq Level 3 tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis, menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.

IKK "Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3" mencerminkan jumlah BLU/D yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3. IKK ini diukur dengan menjumlahkan BLU/D yang mengimplementasikan pengelolaan risiko/manajemen risiko dengan capaian MRI \geq Level 3.

Realisasi IKK "Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3" tahun 2022 adalah sebanyak 3 BLUD atau tercapai 100% dari target 3 BLU/D. Hasil penilaian BLU/D dengan MRI level 3 diperoleh berdasarkan hasil mapping penilaian penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Rendal Pusat Bidang Akuntan Negara. BLU/D dengan MRI \geq Level 3 di wilayah Provinsi Bali antara lain RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, RSUD Kabupaten Klungkung, dan RSUD Wangaya Kota Denpasar.

Faktor penghambat pencapaian kinerja ini karena sebagian besar kesiapan BLU/D dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik belum memadai sehingga masih sangat dibutuhkan upaya teknis dalam rangka mendorong penerapan manajemen risiko (MR).

Realisasi IKK Tahun 2022 meningkat dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebanyak 0 BLUD. Jika melihat target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak 5 BLUD, diperlukan upaya lebih keras lagi dalam meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan merencanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk mendorong BLUD dalam penerapan manajemen risiko.

Perbandingan target dan realisasi IKK " Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.25.



2.5.12 Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Penilaian Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) dijabarkan ke dalam tiga komponen, enam elemen dan 18 topik atas aspek aspek kebijakan, implementasi, dan hasil. Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

IKK "Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3" mencerminkan kualitas kapasitas dan kapabilitas SPI BLU/D dalam menjalankan peran sebagai pengawas intern pada BLU/BLUD masing-masing. IKK ini diukur dengan menghitung jumlah BLU/BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3.

Realisasi IKK "Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3" pada tahun 2022 sebanyak 1 BLU atau tercapai 100% dari target sebesar 1 BLU/D. Hasil penilaian BLU/D dengan Kapabilitas SPI level 3 diperoleh berdasarkan hasil mapping penilaian tingkat kapabilitas SPI pada BLU/D di wilayah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh Rendal Pusat Bidang Akuntan Negara. BLU/D di wilayah Provinsi Bali dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 yaitu Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Pendidikan Ganesha.

Realisasi maupun capaian IKK ini, tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021, karena tidak terdapat IKK tersebut pada tahun 2021. Jika melihat target akhir Renstra Tahun 2024 sebanyak satu BLU/D, diperlukan upaya untuk mempertahankan/meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Faktor penghambat pencapaian kinerja ini karena sebagian besar kesiapan BLU/D dalam peningkatan kapabilitas SPI perusahaan yang belum memadai sehingga masih sangat dibutuhkan upaya teknis dalam rangka mendorong peningkatan kapabilitas SPI pada BLU/D.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan merencanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan assessment kapabilitas SPI untuk mendorong BLU/BLUD dalam peningkatan kapabilitas SPI.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.26.



Sasaran Kinerja 6

Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan

Pencapaian sasaran kegiatan "Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan" diindikasikan dalam capaian tujuh IKK, yaitu:

- ① Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja
- ② Nilai SAKIP Unit Kerja
- ③ Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)
- ④ Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)

- 5 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja
- 6 Skor IKPA Unit Kerja
- 7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatkan Tata Kelola
Unit Perwakilan Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
VI	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan					
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	84,44	112,59	■
6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	88,45	107,87	■
6.3	Persentase efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	87,42	124,88	■
6.4	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)	Persen	100	100	100,00	■
6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	90,1	120,13	■
6.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	97,57	102,71	■
6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	95,06	118,83	■
Rerata Capaian					112,43	

Tabel 3.10 menunjukkan tata kelola Perwakilan BPKP Provinsi Bali belum sepenuhnya terselenggara sesuai target. Dengan demikian sasaran kegiatan "Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan" dengan capaian sebesar 112,43% dari target kinerja tahun 2022. Uraian masing-masing IKK sasaran kegiatan ini sebagai berikut:

2.6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Penetapan IKK "Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja" merupakan salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan harapan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. IKK Skor Zona Integritas, diukur sesuai dengan kertas kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 10 Tahun 2019 (menggunakan nilai sesuai laporan hasil evaluasi dari Kemen PANRB/ nilai sesuai hasil penilaian Inspektorat/ total nilai Komponen Pengungkit atas penilaian mandiri). Realisasi IKK "Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja" pada tahun 2022 sebesar 84,44 skala 100 atau 112,59% dari target nilai 75 skala 100. Nilai skor tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP.

Realisasi maupun capaian IKK ini menurun 1,35 poin dari skala 100 dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 85,79 skala 100. Realisasi tahun 2022 telah melampaui target akhir Renstra tahun 2024 sebesar 79%. Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain:

- 1) Mengoptimalkan fungsi satuan tugas pembangunan zona integritas untuk meningkatkan skor dan membangun inovasi layanan;
- 2) Melakukan perbaikan prosedur serta implementasinya dalam setiap *business process* kegiatan.

Perbandingan target dan realisasi IKK " Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.27.



2.6.2 Nilai SAKIP Unit Kerja

IKK "Nilai SAKIP Unit Kerja" untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, sekaligus untuk mendorong peningkatan kinerja instansi. Penilaian implementasi SAKIP dengan cakupan: 1) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; 2) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; 3) Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan 4) Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan. Realisasi IKK diperoleh dari Nilai SAKIP Unit Kerja sesuai hasil evaluasi dari Inspektorat, atau minimal hasil penilaian mandiri (bila belum ada penilaian dari Inspektorat).



Realisasi IKK "Nilai SAKIP Unit Kerja" pada tahun 2022 dengan nilai 88,45 (kategori A) atau 107,87% dari target nilai 82 (skor skala 100). Nilai tersebut merupakan hasil penilaian mandiri perwakilan atas implementasi Sakip tahun 2021 sampai dengan 2022 dan telah dievaluasi oleh Inspektorat.

Realisasi IKK ini meningkat 1,41 skala dibandingkan dengan tahun 2021 dengan realisasi 87,04 skala 100. Sedangkan capaian kinerja menurun 0,93% dari capaian kinerja tahun 2020 sebesar 108,80%.

Realisasi tahun 2022 dengan nilai 88,45 dari skala 100 telah melampaui nilai target akhir Renstra tahun 2024 sebesar 84. Dengan demikian capaian kinerja ini harus dipertahankan.

Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan capaian kinerja dengan menindaklanjuti saran perbaikan dari hasil evaluasi Inspektorat diantaranya:

- 1 Melaksanakan rencana tindak implementasi SAKIP sebagaimana hasil evaluasi SAKIP Inspektorat;
- 2 Melakukan koordinasi dengan Biro MKOT terkait revisi Renstra.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Nilai SAKIP Unit Kerja" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.28.



2.6.3 Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)

IKK "Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja)" mencerminkan efektivitas pengendalian dan RTP yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Realisasi efektivitas pengendalian intern (SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali) Tahun 2022 sebesar 87,42% atau 124,88% dari target tahun 2022 sebesar 70%. Pada tahun 2022, terdapat 132 pengendalian yang efektif dari 151 pengendalian *existing* yang ada.

Realisasi IKK "Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)" sebesar 87,42%, meningkat dari realisasi tahun 2021 sebesar 75,86%. Realisasi Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024 karena tidak terdapat IKK ini. Dengan demikian diperlukan penyesuaian dan revisi renstra perwakilan mengikuti dengan perubahan indikator kinerja.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Perwakilan;
2. Melakukan monitoring perkembangan penyelenggaraan SPIP secara berkala.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.29.



2.6.4 Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)

IKK "Persentase penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) (MRI unit kerja)" mencerminkan jumlah realisasi Rencana Tindak Pengendalian yang diselesaikan dibandingkan jumlah RTP setahun. Pengukuran IKK dilakukan menggunakan aplikasi Bewise.

Persentase penyelesaian RTP (MRI unit kerja) Tahun 2022 sebesar 100% sesuai target kinerja pada tahun 2022. RTP Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2022 sebanyak 31 RTP telah terlaksana.

Realisasi dan capaian IKK "Persentase penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) (MRI unit kerja)" sama dengan realisasi kinerja tahun

2021 sebesar 100%. Realisasi IKK Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan target renstra karena belum terdapat target IKK ini pada Renstra Tahun 2020-2024.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.30.



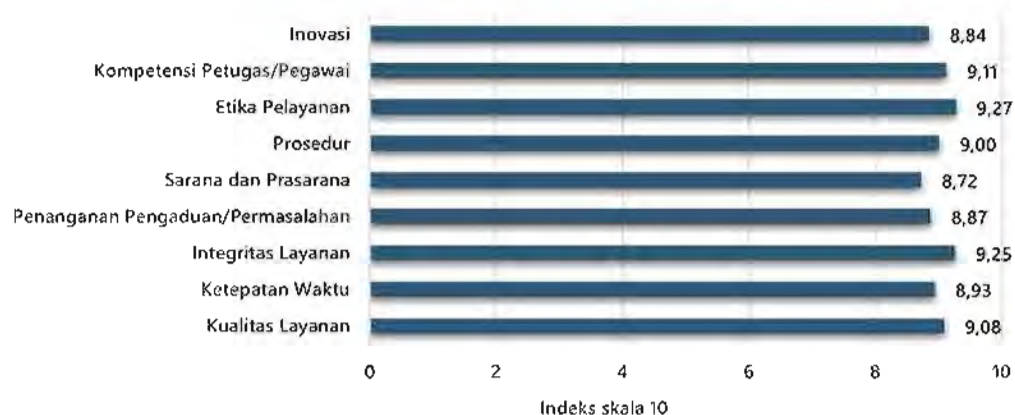


2.6.5 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja

IKK "Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja" merupakan skor indeks kepuasan atas layanan BPKP kepada *stakeholder* guna mengetahui peningkatan kualitas layanan BPKP pada unit kerja *stakeholders*. IKK ini diukur menggunakan survei layanan perwakilan.

Realisasi IKK "Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja" tahun 2022 dengan nilai 90,1 dari skala 100 atau 120,13% dari target nilai 75 dari skala 100. Nilai tersebut merupakan hasil survei kepada *stakeholder* dengan pertanyaan terkait kualitas layanan, ketepatan waktu, integritas pelayanan, penanganan pengaduan/permasalahan, sarana dan prasarana, prosedur, etika pelayanan, kompetensi petugas, dan inovasi. Dengan nilai untuk setiap unsur pengukuran sebagai berikut:

Hasil Survei Kepuasan Layanan Unit Kerja



Realisasi IKK tahun 2022 sebesar 90,1 meningkat 1,2 skala dari realisasi kinerja tahun 2021 dengan nilai 88,90. Realisasi tahun 2022 telah melampaui target akhir Renstra tahun 2024 pada nilai 81 dari skala 100. Capaian kinerja ini harus dipertahankan lagi pada tahun-tahun berikutnya.



Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain dengan:

1. Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kerjasama yang baik dengan para *stakeholders* dalam rangka mengawal akuntabilitas keuangan negara/daerah dan meningkatkan tata kelola pemerintahan;
2. Lebih cermat lagi dalam memahami kebutuhan *stakeholders* sehingga kehadiran BPKP lebih dirasakan manfaatnya.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.31.



2.6.6 Skor IKPA Unit Kerja

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKK "Skor IKPA Unit Kerja" bertujuan meningkatkan kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan laporan keuangan. Pengukuran IKK ini berdasarkan hasil penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan.

Realisasi IKK "Skor IKPA Unit Kerja" pada tahun 2022 sebesar 97,57 dari skala 100 atau 102,71% dari target 95,00. Realisasi tersebut merupakan hasil penilaian pelaksanaan anggaran tahun 2022 oleh Kementerian Keuangan sesuai data aplikasi OM SPAN.

Realisasi IKK ini menurun 0,59 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 98,16. Realisasi tahun 2022 telah melampaui target akhir Renstra tahun 2024 sebesar 90 dari skala 100. Dengan demikian capaian kinerja ini perlu ditingkatkan lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- 1 Mengimplementasikan aplikasi pengelolaan keuangan yang dikembangkan oleh BPKP Pusat secara *realtime* untuk monitoring pelaksanaan anggaran dan memperlancar pertanggungjawaban kegiatan;
- 2 Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh bidang/bagian, terutama dalam perencanaan kas dan pelaksanaan anggaran; dan
- 3 Meningkatkan ketelitian dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan, revisi anggaran dan penyusunan laporan keuangan.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Skor IKPA Unit Kerja" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.32.



2.6.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

IKK "Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja" mencerminkan tingkat pengelolaan BMN unit kerja. Pengukuran IKK ini dilakukan secara *self assessment* dengan mengisi form penilaian pengelolaan BMN, dan kemudian divalidasi oleh Biro Umum.

Nilai Pengelolaan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada tahun 2022 sebesar 95,06 dari skala 100 atau tercapai 118,83% dari target 80 skala 100. Nilai tersebut merupakan hasil *self assessment* pengelolaan BMN Perwakilan Bali yang telah divalidasi oleh Biro Umum.

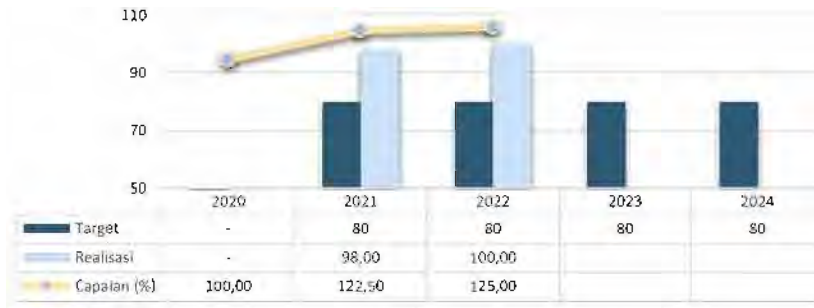
Realisasi maupun capaian IKK ini menurun 2,94 skala dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 98 skala 100.

Realisasi tahun 2022 dengan nilai 95,06 dari skala 100 telah melampaui target akhir Renstra tahun 2024 bernilai "baik" atau nilai 80 dari skala 100. Dengan demikian capaian kinerja ini harus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana tindak ke depan untuk mempertahankan capaian kinerja dengan senantiasa melaksanakan tertib administrasi dalam pengelolaan BMN serta melakukan pemantauan kondisi dan perawatan BMN secara berkala. Perbandingan target dan realisasi IKK "Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja" tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada Grafik 3.33.

Grafik 3.33

IKK 6.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja



C. ANALISIS EFISIENSI

Rerata capaian efisiensi kegiatan operasional tahun 2022 adalah sebesar 96,76% untuk penggunaan dana dan 115,28% untuk penggunaan SDM. Secara umum, proses kegiatan operasional BPKP telah dilaksanakan secara efisien ditinjau dari penggunaan dana dan SDM. Efisiensi atau daya guna berhubungan erat dengan produktivitas, yaitu pengukuran dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (*cost of output*). Kegiatan operasional disebut efisien bila:

- ① Suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan input serendah-rendahnya (*spending well*).
- ② Adanya penurunan atau penghapusan biaya yang tidak perlu (*cost reduction*).

Analisis efisiensi dilakukan per sasaran kegiatan. Penyimpulan efisiensi adalah sebagai berikut:

- ① Efisien jika rasio efisiensi sama atau lebih besar dari 100%.
- ② Belum efisien jika rasio efisiensi lebih kecil dari 100%.

Efisiensi penggunaan dana tertinggi berada pada sasaran kegiatan 2 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional sebesar 115,11% dan efisiensi penggunaan SDM tertinggi berada pada sasaran kegiatan 4 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi sebesar 246,56%. Rincian hasil penghitungan efisiensi per sasaran strategis disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Hasil Penghitungan Efisiensi per Sasaran Kegiatan Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Capaian Input (%)		Capaian Output	Efisiensi (%)	
		Dana	SDM		Dana	SDM
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	98,14	125,34	112,5	114,63	89,75
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	98,14	117,20	112,96	115,11	96,38

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Capaian Input (%)		Capaian Output	Efisiensi (%)	
		Dana	SDM		Dana	SDM
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	96,96	179,83	100,00	103,13	55,61
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	93,48	40,56	100,00	106,98	246,56
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	96,35	121,14	100,00	103,79	82,55
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	97,51	107,64	100,00	102,56	92,90
Rerata Capaian		96,76	115,28	104,24	107,70	110,63

D. KINERJA LAINNYA TAHUN 2022

Pada tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menerima apresiasi sebagai berikut:



Peringkat 2 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pagu Kecil dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali

Predikat Terbaik Kedua untuk Kategori Pengelolaan Disiplin Pegawai dalam Forum Kepegawaian Tahun 2022



E. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2022

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2022 sebesar Rp24.303.726.075,00 atau terserap 97,57% dari anggaran sebesar Rp24.908.362.000,00.

Rincian penggunaan anggaran per jenis belanja disajikan pada Tabel 3.14. Rincian penggunaan anggaran per kegiatan disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Keuangan per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	17.044.368.000	16.594.124.264	97,36
2	Belanja Barang	7.479.039.000	7.326.388.630	97,96
3	Belanja Modal	384.955.000	383.213.181	99,55
Jumlah		24.908.362.000	24.303.726.075	97,57

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Keuangan per Kegiatan

Kode Kegiatan	Jenis Belanja/RO	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
3701	Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan	3.985.946.000	3.903.140.427	97,88
FAG.001	Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi	58.814.000	56.749.813	96,49
FAG.U02	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	136.012.000	134.449.865	98,85
FAG.003	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	2.239.949.000	2.193.353.917	97,92
FAG.005	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	71.674.000	68.670.592	95,81
UAG.U03	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	1.044.334.000	1.031.402.217	98,76
FAG.U06	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha	28.015.000	27.163.700	96,96
UAG.U10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	66.105.000	62.135.000	93,99
FAG.U07	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	32.608.000	30.481.130	93,48
FAG.011	Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	21.520.000	20.619.220	95,81
UAG.U09	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	286.915.000	278.114.973	96,93
FAG.012	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	52.873.000	50.098.080	94,75
3676	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	20.922.416.000	20.400.585.648	97,51
EBA.962	Layanan Umum	523.070.000	512.359.311	97,95
EBA.994	Layanan Perkantoran	19.961.518.000	19.454.915.076	97,46
EBB.951	Layanan Sarana Internal	34.955.000	34.229.181	97,92
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	350.000.000	348.984.000	99,71
Jumlah		24.908.362.000	24.303.726.075	97,57

Penggunaan Dana Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan beberapa tugas dan fungsi BPKP atas permintaan Pihak Ketiga (Mitra Kerja), BPKP menggunakan dana dari mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan BUMD sesuai dengan kebijakan penggunaan dana Pihak Ketiga yang diatur melalui SK Kepala BPKP dan diatur lebih lanjut oleh deputi teknis yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16
Penggunaan Dana Pihak Ketiga

No	Bidang	Realisasi Dana Pihak Ketiga (Rp)
1	Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	185.175.724
2	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	56.753.000
3	Akuntan Negara	265.819.000
4	Investigasi	105.369.000
Jumlah		613.116.724

BAB IV

PENUTUP





PENUTUP

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja BPKP. Laporan Kinerja ini merupakan periode pelaporan ketiga dalam merefleksikan pelaksanaan Renstra BPKP 2020-2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dari 29 IKK yang diukur pada tahun 2022 sebanyak 27 IKK mencapai kinerja $\geq 100\%$ dan dua IKK mencapai kinerja $< 100\%$. IKK capaian tertinggi adalah IKK Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel dengan capaian 3.180%. Sedangkan IKK yang memiliki capaian kurang dari 100% adalah IKK Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik dan IKK "Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah"

Meskipun berbagai strategi telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya pencapaian sasaran program memerlukan upaya dan kerja keras yang berkesinambungan serta mengidentifikasi penyebab. Rencana tindak untuk peningkatan kinerja atas IKK yang belum mencapai target meliputi:

IKK "Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik"	Memberikan kegiatan bimbingan teknis, FGD, sosialisasi FRA, FCP dan workshop anti korupsi untuk mendorong peningkatan nilai IEPK.
	Mendorong penyusunan kebijakan pengendalian kecurangan terutama komitmen pimpinan Kepala Daerah se-Provinsi Bali untuk melakukan internalisasi kebijakan tersebut.
	Menginformasikan kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan internalisasi budaya organisasi terkait masalah penguatan nilai-nilai integritas pada semua pegawai dan penumbuhkembangan paradigma/nilai baru antikorupsi yang terintegrasi dengan sistem yang sudah ada.
	Mendorong pembentukan Masyarakat Pembelajar Antikorupsi (MPAK) dan Komunitas Pembelajar Antikorupsi (KomPAK) dan bukti nyata edukasi yang telah dilakukan oleh tim KomPAK.
IKK "Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah"	Memantau keselarasan perencanaan dan penganggaran setiap tahun dengan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan perencanaan pembangunan nasional
	Membangun mekanisme/sistem informasi yang memadai guna memantau keselarasan perencanaan dan pemenuhan kriteria SMART pada indikator dan target kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

KILAS PERISTIWA 2022

JANUARI



1. Entry Meeting Assesment Good Corporate Governance pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) ITDC.
2. Sosialisasi dan Bimtek Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.
3. Bimbingan Teknis/Diklat Penyusunan Business Plan Berbasis Permendagri Nomor:118 Tahun 2018 bagi para pejabat di lingkungan Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem.

FEBRUARI

1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun 2021 kepada Gubernur Bali.
2. Wali Kota Denpasar Menerima Piagam Penghargaan Atas Capaian Kapabilitas APIP Level 3 Insektorat Kota Denpasar.
3. Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Mandiri yang diselenggarakan oleh Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli.



MARET

1. Evaluasi atas Optimalisasi KPBU di Provinsi Bali dan Kabupaten Badung.
2. Pengawasan atas Percepatan Vaksinasi Dosis-2 dan Booster oleh TNI dan Polri di Provinsi Bali.
3. Pengawasan Kartu Sembako Triwulan I Tahun 2022



APRIL

1. Audit Atas Pembayaran Penanganan Darurat Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Bali-Penida (Proyek Penanganan Bencana Longsor Danau Batur) Tahun 2022.
2. Evaluasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa.
3. Reviu Penyusunan Owner Estimate (OE) dan proses pengadaan rekanan pekerjaan pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi khusus (KEK) Kesehatan Sanur pada PT Hotel Indonesia Natour (Persero).



MEI



1



2



- Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) ini dilakukan pada Balai Wilayah Sungai Bali – Penida atas Kegiatan Proyek Pembangunan Bendungan Tamblang.
- Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Balai Wilayah Sungai Bali Penida atas Kegiatan Proyek Pembangunan Bendungan Tamblang dan Pelaksanaan Program Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Bendungan Provinsi Bali TW II Tahun 2022.

JUNI

1. Perwakilan BPKP Provinsi Bali melakukan Pengawasan atas Pekerjaan Revetment dan Retaining Wall Dumping 2 dan Dermaga Curah Cair di Pelabuhan Benoa
2. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Presidensi G20
3. Reviu terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Design and Build Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sanur



3



1



2

JULI

1. Workshop Tata Kelola Keuangan Desa Adat yang Akuntabel dan Transparan
2. Penguatan Pemahaman Penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Se-Provinsi Bali.
3. Rapat Kick Off Meeting Korsup Sektor Pariwisata



1



3



2



AGUSTUS

1. Workshop Pandangan Hukum atas Wicara LPD Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah se-Provinsi Bali
2. Reviu Penambahan Anggaran Pembangunan Bendungan Tamblang



2



1

SEPTEMBER



1. Kepala Perwakilan menghadiri penyerahan bantuan untuk sapi yang terjangkit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang sudah dipotong bersyarat.
2. Monitoring atas Pelaksanaan Penyaluran BLT-BBM.
3. Pendataan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), dan Charging Station dalam rangka mendukung penyelenggaraan KTT G20 Bali.

OKTOBER

1. Evaluasi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Bali dengan uji petik Kabupaten Buleleng
2. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Bias Munjul di Pulau Nusa Ceningan
3. Ekspos Panel Jenjang Satu atas Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Bangli dan Inspektorat Kabupaten Buleleng.



NOVEMBER

1. Kunjungan pada Proyek Bali Maritim Tourism Hub di Pelabuhan Benoa. Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)
2. Workshop Pemanfaatan Digital Forensic dan Data Analytics untuk Mendukung Kegiatan Pengawasan APIP di Wilayah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat
3. Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bangli



DESEMBER

1. Monitoring Pendistribusian Alat Bantu Penerimaan Siaran (Set Top Box).
2. Workshop Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar.
3. Bimbingan teknis peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kota Denpasar.



**TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN SASARAN PROGAM SASARAN KEGIATAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
TAHUN 2022**

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Kinerja Kegiatan				Anggaran			SDM			
				Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Program Pengawasan Pembangunan														
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	3.474,00	4.264,46	122,75							
		1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	435.688,00	438.685,45	100,69							
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	770,00	5.307,47	689,28							
Jumlah/Capaian Rata-Rata					439.932,00	448.257,38	304,24	194.826.000	191.199.678	98,14	7.249	9.086	125,34	
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	2	4	200							
		2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Topik APPD	2	2	100							
		2.3	Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti	Persen	80	81,25	101,56							
Capaian Rata-Rata							133,85	3.355.957.000	3.293.426.726	98,14	250	293	117,20	
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	9	100,00							
		3.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	2	200,00							
		3.3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	27	59	218,52							
		3.4	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	8	10	125,00							
Capaian Rata-Rata							160,88	28.015.000	27.163.700	96,96	823	1.480	179,83	

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Kinerja Kegiatan			Anggaran			SDM				
				Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00							
		4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80	100	125,00							
		4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3	1	33,33							
		4.4	Jumlah Pemda menindaklanjuti <i>Area Of Improvement</i> dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1	3	300,00							
Capaian Rata-Rata							139,58	32.608.000	30.481.130	93,48	3.225	1.308	40,56	
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1	1	100,00							
		5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	7	7	100,00							
		5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1	1	100,00							
		5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	9	9	100,00							
		5.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Prov	1	1	100,00							
		5.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	3	3	100,00							
		5.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	4	3	75,00							
		5.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20	636	3.180,00							
		5.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	20	30	150,00							
		5.10	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	1	1	100,00							
		5.11	Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3	BLU/D	3	3	100,00							
		5.12	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLU/D	1	1	100,00							
Capaian Rata-Rata							358,75	374.540.000	360.869.193	96,35	1.793	2.172	121,14	
								3.985.946.000	3.903.140.427	97,92	13.340	14.339	107,49	

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Kegiatan				Anggaran			SDM			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
B Program Dukungan Manajemen													
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	84,44	112,59						
		6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	88,45	107,87						
		6.3	Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	Persen	70	87,42	124,88						
		6.4	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)	Persen	100	100,00	100,00						
		6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	90,10	120,13						
		6.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	97,57	102,71						
		6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	95,06	118,83						
Capaian Rata-Rata							112,43	20.922.416.000	20.400.585.648	97,51	13.749	14.799	107,64
Total							201,62	24.908.362.000	24.303.726.075	97,57	27.089	29.138	107,56

Lampiran II

Lap. No : OT.04/LPP-93/PW22/6/2023

Tanggal : 9 Januari 2023

**PERBANDINGAN REALISASI SASARAN KEGIATAN TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2021 DAN TAHUN 2024
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI**

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Program/Kegiatan									
			Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (Turun)	Capaian 2022	Capaian 2021	Naik (Turun)	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
A. Program Pengawasan Pembangunan												
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi	Rupiah (Dalam juta)	4.264,46	6.601,20	(2.336,74)	122,75	304,46	(254,79)	2.710,00	157,36
		1.2	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Dalam juta)	438.685,45	455.597,41	(16.911,96)	100,69	203,02	2,07	112.930,00	388,46
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rupiah (Dalam juta)	5.307,47	28.319,51	(23.012,04)	689,28	296,44	269,53	51.982,00	10,21
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	4	NA	NA	200,00	NA	NA	NA	NA
		2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Topik APPD	2	NA	NA	100,00	NA	NA	NA	NA
		2.3	Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti	Persen	81	NA	NA	101,56	NA	NA	NA	NA
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	9	-	100,00	112,5	(12,50)	9	100,00
		3.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2	1	1	200,00	100	100,00	1	200,00
		3.3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun <u>Janoran</u>	BUMDes	59	19	40	218,52	105,56	112,96	38	155,26
		3.4	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	10	NA	NA	125,00	NA	NA	NA	NA
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persentase	100,00	100,00	-	100,00	100	0,00	100	100,00
		4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persentase	100,00	100,00	-	125,00	133,33	(8,33)	90	111,11
		4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	1	0	1	33,33	NA	NA	4	25,00
		4.4	Jumlah Pemda menindak lanjuti <i>Area Of Improvement</i> dari hasil pengukuran EPK	Pemda	3	1	2	300,00	100	200,00	NA	NA

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Kinerja Program/Kegiatan								
				Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (Turun)	Capaian 2022	Capaian 2021	Naik (Turun)	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024
1		2		3	4	6	7	9	10	11		
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Prov	1	1	-	100,00	100	-	1	100,00
		5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Kab/Kota	7	5	2	100,00	100	-	9	77,78
		5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Prov	1	1	-	100,00	100	-	1	100,00
		5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Kab/Kota	9	9	-	100,00	100	-	9	100,00
		5.5	Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3	Kab/Kota	1	1	-	100,00	50	50,00	1	100,00
		5.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Desa	3	0	3	100,00	200	(100,00)	5	60,00
		5.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	APIP	3	3	-	75,00	450	(375,00)	10	30,00
		5.8	Jumlah Desa yang pengelolaannya akuntabel	Pemda	636	636	-	3180,00	37,5	3.142,50	413	154,00
		5.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	30	6	24	150,00	120	30,00	176	17,05
		5.10	Jumlah BUMD dengan MRI > Level 3	BUMD	1	0	1	100,00	0	100,00	4	25,00
		5.11	Jumlah BLU/D dengan MRI ≥ Level 3	BLU/D	3	0	3	100,00	0	100,00	5	60,00
		5.12	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI ≥ Level 3	BLU/D	1	0	1	100,00	0	100,00	1	100,00
B Program Dukungan Manajemen												
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	84,44	85,79	(1,35)	112,59	114,39	(1,80)	79	106,89
		2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	88,45	87,04	1,41	107,87	108,80	(0,93)	84	105,30
		3	Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	Persen	87,42	75,86	11,56	124,88	105,26	19,62	NA	NA
		4	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)	Persen	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	NA	NA
		5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	90,10	88,90	1,20	120,13	118,53	1,60	81	111,23
		6	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	97,57	98,16	(0,59)	102,71	103,33	(0,62)	90	108,41
		7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	95,06	98,00	(2,94)	118,83	122,50	(3,68)	Baik	NA

**TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK) TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI**

Sasaran Kegiatan/Program			Rincian Output (RO)		Kinerja RO				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana	Efisiensi SDM
					Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi	Laporan	1	1	100,00	58.814.000	56.749.813	96,49					
			2	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	Laporan	7	8	114,29	136.012.000	134.449.865	98,85					
			Sub Jumlah Saskeg 1			8	9	112,5	194.826.000	191.199.678	98,14	7.249	9.086	125,34	Efisien	Blm Efisien
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional		3	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	Laporan	32	35	109,38	2.239.949.000	2.193.353.917	97,92					
			4	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	Laporan	2	2	100,00	71.674.000	68.670.592	95,81					
			5	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Laporan	20	24	120,00	1.044.334.000	1.031.402.217	98,76					
			Sub Jumlah Saskeg 2			54	61	112,96	3.355.957.000	3.293.426.726	98,14	250	293	117,20	Efisien	Blm Efisien
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha		6	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha	Laporan	1	1	100,00	28.015.000	27.163.700	96,96					
			Sub Jumlah Saskeg 3			1	1	100,00	28.015.000	27.163.700	96,96	823	1480	179,83	Efisien	Blm Efisien
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian		7	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	Laporan	1	1	100,00	32.608.000	30.481.130	93,48					
			Sub Jumlah Saskeg 4			1	1	100,00	32.608.000	30.481.130	93,48	3225	1308	40,56	Efisien	Efisien
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU		8	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	Laporan	1	1	100,00	66.105.000	62.135.000	93,99					
			9	Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	Laporan	1	1	100,00	21.520.000	20.619.220	95,81					
			10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	Laporan	2	2	100,00	286.915.000	278.114.973	96,93					
Sub Jumlah Saskeg 5			4	4	100,00	374.540.000	360.869.193	96,35	1.793	2.172	121,14	Efisien	Blm Efisien			

Sasaran Kegiatan/Program		Rincian Output (RO)		Kinerja RO				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana	Efisiensi SDM
				Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	11	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	Laporan	1	1	100,00	52.873.000	50.098.080	94,75					
	Pelaksanaan Dukungan Manajemen BPKP	12	Layanan Umum	layanan	1	1	100,00	523.070.000	512.359.311	97,95					
		13	Layanan Perkantoran	layanan	1	1	100,00	19.961.518.000	19.454.915.076	97,46					
		14	Layanan Sarana Internal	unit	17	17	100,00	34.955.000	34.229.181	97,92					
		15	Layanan Prasarana Internal	unit	4	4	100,00	350.000.000	348.984.000	99,71					
		Sub Jumlah Saskeg 6			24	24	100,00	20.922.416.000	20.400.585.648	97,51	13.749	14.799	107,64	Efisien	Blm Efisien
Total					92	100	108,70	24.908.362.000	24.303.726.075	97,57	27.089	29.138	107,56	Efisien	Efisien

Lampiran IV

Lap. No : OT.04/LPP-93/PW22/6/2023

Tanggal : 9 Januari 2023

**PERBANDINGAN KINERJA OUTPUT KEGIATAN IOK TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2021
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI**

Sasaran Kegiatan/Program		Rincian Output (RO)		Kinerja Rincian Output						
				Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Naik (turun) Realisasi	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2021	% Naik (turun) Capaian
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi	Laporan	1	NA	NA	100,00	NA	NA
		2	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	Laporan	8	NA	NA	114,29	NA	NA
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	3	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	Laporan	35	NA	NA	109,38	NA	NA
		4	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	Laporan	2	10	(8)	100,00	111,11	(11,11)
		5	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Laporan	24	NA	NA	120,00	NA	NA
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	6	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha	Laporan	1	NA	NA	100,00	NA	NA
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	7	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	Laporan	1	NA	NA	100,00	NA	NA

Sasaran Kegiatan/Program		Rincian Output (RO)		Kinerja Rincian Output						
				Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Naik (turun) Realisasi	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2021	% Naik (turun) Capaian
1		2		3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	8	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	Laporan	1	NA	NA	100,00	NA	NA
		9	Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	Laporan	1	2	(1)	100,00	100,00	0,00
		10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	Laporan	2	NA	NA	100,00	NA	NA
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	11	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	Laporan	1	NA	NA	100,00	NA	NA
		12	Layanan Umum	layanan	1	2	(1)	100,00	100,00	0,00
		13	Layanan Perkantoran	layanan	1	1	0	100,00	100,00	0,00
		14	Layanan Sarana Internal	unit	17	11	6	100,00	100,00	0,00
		15	Layanan Prasarana Internal	unit	4	2	2	100,00	100,00	0,00

Lampiran V

Lap. No : OT.04/LPP-93/PW22/6/2023

Tanggal : 9 Januari 2023

Daftar Proyek Strategis Nasional di Wilayah Provinsi Bali yang Diawasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2022

Kode Cluste	Nama Cluster	No	Kode PSN	Nama PSN	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Mencapai/Belum Mencapai Target	Sumber Data (Nomor LHP)	Rendal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Sektor Jalan dan Jembatan	1	A.52	Proyek Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi		0	0	Belum ada target	PE.11.03/LHP-1047/PW22/2/2022	D103
B	Sektor Pelabuhan	2	B.55	Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul		100	100	Mencapai target	PE.11.03/LHP-1019/PW22/2/2022	D103
		3	B.66	Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub)		60,88	59,75	Tidak mencapai target	PE.12.03/LHP-1054/PW22/4/2022	D103
		4	B.55b	Pembangunan Pelabuhan Sanur		98,69	99,45	Mencapai target	PE.12.03/LHP-1044/PW22/2/2022	D103
C	Sektor Bandar Udara	5	C.80.a	Pembangunan Bandar Udara Bali Utara		0	0	Belum ada target	-	D103
D	Sektor Kereta	6	D.90	Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Rel Wilayah Badung - Buleleng		0	0	Belum ada target	-	D103
G	Sektor Bendungan dan Irigasi	7	G.147	Pembangunan Bendungan Tamblang		99,174	99,276	Mencapai target	PE.11.03/LHP-1037/PW22/2/2022	D103
		8	G.137	Pembangunan Bendungan Sidan		51,066	51,412	Mencapai target	PE.11.03/LHP-1020/PW22/2/2022	D103
H	Sektor Air Bersih dan Sanitasi	9	H. 174	Proyek Sistem Penyediaan Air Baku (SPAB) Bendungan Sidan		0	0	Belum ada target	PE.11.03/LHP-1025/PW22/2/2022	D103
P	Program Pemerataan Ekonomi	10	P.204.a.17	Sertifikasi Lahan pada Provinsi Bali	Sertifikat	23.825	14.502	Tidak mencapai target	PE.11.03/LHP-1046/PW22/2/2022	D103
T	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	11	T.208.2	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)				Tidak mencapai target	PE.12.03/LHP-786/PW22/3/2022	D103

Tingkat Kesehatan BUMN/Anak Perusahaan/BUMD/BLU di Wilayah Provinsi Bali

No.	Nama BUMN/Anak Perusahaan/BUMD/BLU	Kinerja Tahun 2021		ICORPAC			GCG		Manajemen Risiko			Kapabilitas SPI			IEPK		
		Nilai	Kategori	Skor	Huruf	Predikat	Skor	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
A. BUMN																	
1	PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	-	-	74,56%	Tujuh Puluh Empat Koma Lima Puluh Enam Persen	BAIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. BUMD																	
1	Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung	3,27	Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli	3,01	Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perumda Air Minum Tirta Hita Kabupaten Buleleng	3,77	Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perumda Air Minum Tirta Amerta Jati Kabupaten Jembrana	3,04	Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar	3,47	Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem	3,26	Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Perumda Air Minum Panca Mahottama Kabupaten Klungkung	2,99	Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan	3,63	Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar	3,94	Sehat	-	-	-	-	-	100	Level 3	-	-	-	-	-	-	-
C. BLU																	
1	Universitas Pendidikan Ganesha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,50	Level 3	-	-	-	-
2	Universitas Udayana	78,04	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. BLUD																	
1	RSUD Bali Mandara Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	100	Level 3	-	-	-	-	-	-	-
2	RSUD Kabupaten Klungkung	-	-	-	-	-	-	-	93,18	Level 3	-	-	-	-	-	-	-
3	RSUD Wangaya Kota Denpasar	82,26	Baik	-	-	-	-	-	95,45	Level 3	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran VII

Lap. No : OT.04/LPP-93/PW22/6/2023

Tanggal : 9 Januari 2023

Tingkat Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, MRI dan efektivitas Pengendalian Korupsi Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bali

No.	Nama Pemda	SPIP			Kapabilitas			MR			IEPK		
		Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	Provinsi Bali	3,380	3	Terdefinisi	3,14	3	<i>Delivered</i>	3,313	3	<i>Risk Defined</i>	3,000	3	
2	Kota Denpasar	3,359	3	Terdefinisi	3,14	3	<i>Delivered</i>	3,106	3	<i>Risk Defined</i>	2,856	2	
3	Kabupaten Badung	3,161	3	Terdefinisi	3,00	3	<i>Delivered</i>	2,970	2	<i>Risk Aware</i>	2,781	2	
4	Kabupaten Tabanan	3,208	3	Terdefinisi	3,00	3	<i>Delivered</i>	3,094	3	<i>Risk Defined</i>	2,640	2	
5	Kabupaten Klungkung	3,183	3	Terdefinisi	3,00	3	<i>Delivered</i>	3,047	3	<i>Risk Defined</i>	2,856	2	
6	Kabupaten Gianyar	3,180	3	Terdefinisi	3,00	3	<i>Delivered</i>	2,919	2	<i>Risk Aware</i>	2,664	2	
7	Kabupaten Buleleng	3,138	3	Terdefinisi	3,00	3	<i>Delivered</i>	2,978	2	<i>Risk Aware</i>	2,437	2	
8	Kabupaten Jembrana	3,122	3	Terdefinisi	2,71	2+	<i>Structured</i>	2,962	2	<i>Risk Aware</i>	2,641	2	
9	Kabupaten Karangasem	3,030	3	Terdefinisi	2,56	2+	<i>Structured</i>	2,971	2	<i>Risk Aware</i>	2,751	2	
10	Kabupaten Bangli	3,001	3	Terdefinisi	3,00	3	<i>Delivered</i>	2,862	2	<i>Risk Aware</i>	2,625	2	

Lampiran VIII

Lap. No : OT.04/LPP-93/PW22/6/2023

Tanggal : 9 Januari 2023

**Daftar Penghargaan yang Diterima Tahun 2022
Perwakilan BPKP Provinsi Bali**

No.	Nama Penghargaan	Instansi/Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan	Ringkasan Substansi Penghargaan
1	Rangking 2 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pagu Kecil	Kementerian Keuangan	2022	
2	Predikat Terbaik Kedua Kategori Pengelolaan Disiplin Pegawai dalam Forum Kepegawaian	BPKP	2022	